

# LAPORAN TAHUNAN 2021



**KOMISI INFORMASI**  
P R O V I N S I L A M P U N G



<https://kip.lampungprov.go.id/>



[kiplampung@yahoo.com](mailto:kiplampung@yahoo.com)



[kip.Lampung](https://www.facebook.com/kip.Lampung)



[kip.Lampung](https://www.instagram.com/kip.Lampung)



0721 470585

# KATA PENGANTAR

---

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua masih diberikan kemampuan, kekuatan dan kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik Pasal 28 ayat 2: “Komisi Informasi provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi yang bersangkutan”. Penyusunan Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam mengawal keterbukaan informasi di Lampung. Data yang dihimpun dalam laporan ini merupakan data dari Bulan Januari 2021 – Bulan Desember 2021 yang terdiri dari 3 (tiga) Divisi yaitu Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi, Divisi Sosialisasi dan Edukasi, dan Divisi Advokasi dan Monev serta laporan yang bersumber dari Kesekretariatan Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Dalam penyusunan laporan ini tentu tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan kesempurnaan, namun harapan kami Laporan Tahunan Komisi Informasi Provinsi Lampung Tahun 2021 ini dapat dimanfaatkan dalam mendorong peningkatan kualitas Keterbukaan Informasi Publik di Lampung.

Bandar Lampung, Januari 2022

**Komisi Informasi Provinsi Lampung**

**Ketua,**

**Ir. Ahmad Alwi Siregar**

# DAFTAR ISI

---

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>1</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>2</b>
<b>BAB I       PENDAHULUAN.....</b>	<b>3</b>
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>3</b>
<b>B. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang.....</b>	<b>4</b>
<b>C. Profil Komisioner .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Lampung .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Struktur Organisasi Komisi Informasi .....</b>	<b>13</b>
<b>F. Sumber Daya Manusia .....</b>	<b>14</b>
<b>G. Sarana dan Prasarana .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB II       PELAKSANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM .....</b>	<b>16</b>
<b>A. Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi .....</b>	<b>16</b>
<b>B. Divisi Sosialisasi dan Edukasi .....</b>	<b>24</b>
<b>C. Divisi Advokasi dan Monev .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB III      PENUTUP .....</b>	<b>45</b>
<b>Lampiran 1 Realisasi Anggaran Tahun 2021 .....</b>	<b>46</b>
<b>Lampiran 2 Daftar Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Tahun 2021 .....</b>	<b>47</b>
<b>Lampiran 3 Daftar Kegiatan Komisi Informasi Tahun 2021 .....</b>	<b>56</b>
<b>Lampiran 4 Surat Masuk dan Surat Keluar Tahun 2021 .....</b>	<b>65</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

---

### A. Latar Belakang

Di era modern saat ini kebutuhan memperoleh informasi merupakan hal yang dianggap penting bagi semua kalangan. Dengan teknologi komunikasi yang semakin canggih memungkinkan kita mengakses berbagai macam informasi. Sebagai warga Negara kita mempunyai hak mendapatkan informasi yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945.

Pasal 28F dinyatakan: “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan ideologi Pancasila. Dalam perwujudan keterbukaan informasi publik, pemerintah Indonesia secara khusus mensahkan adanya keberadaan Undang - Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap Orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Keterbukaan informasi memberikan akses kepada publik untuk memperoleh informasi yang bermanfaat sekaligus sebagai sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Keberadaan Komisi Informasi dijelaskan dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 (UU KIP) yang menyatakan Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik dan menyelesaikan

Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi. Oleh karena itu, Komisi Informasi Provinsi Lampung Periode Tahun 2020-2024 mempunyai Visi yaitu “Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Menuju Provinsi Lampung Berjaya” dan dengan beberapa Misi yaitu “Mendorong Partisipasi Masyarakat Untuk Menggunakan Hak Konstitusionalnya Dalam Hal Keterbukaan Informasi Publik Dan Mendorong Badan Publik Untuk Memberikan Layanan Informasi Yang Berkualitas”.

Komisi Informasi Provinsi Lampung, dalam pelaksanaan tugasnya terdiri dari 5 komisioner yaitu ketua, wakil ketua dan anggota komisioner Komisi Informasi yang membidangi 3 (tiga) Divisi yaitu Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi, Divisi Sosialisasi dan Edukasi, dan Divisi Advokasi dan Monev.

Selanjutnya laporan ini menjadi gambaran pelaksanaan kegiatan dan penggunaan APBD Tahun Anggaran 2021, juga menjadi sinergi untuk memperbaiki kinerja pengelolaan informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Lampung agar terus ditingkatkan melalui beragam program Keterbukaan Informasi Publik. Harapannya, pelayanan kepada Publik dan Badan Publik dapat berjalan sesuai rencana untuk mendukung transparansi publik.

## **B. Tugas Pokok, Fungsi dan Wewenang**

### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan Pasal 26 UUKIP, Tugas Komisi Informasi adalah menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang ini.

### **2. Fungsi**

Berdasarkan Pasal 23 UUKIP, Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UUKIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik (SLIP) dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi Nonlitigasi.

### 3. Wewenang

Berdasarkan Pasal 27 UUKIP dalam menjalankan tugasnya Komisi Informasi memiliki wewenang :

- a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.
- b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh badan publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik.
- c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.
- d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Nonlitigasi penyelesaian sengketa informasi publik.
- e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Dengan demikian Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai kewenangan penyelesaian sengketa informasi publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.

### C. Profil Komisioner

#### 1. Ir. Ahmad Alwi Siregar



Ahmad Alwi Siregar dilahirkan di Tanjungkarang pada 19 September 1959. Suami dari Henny Erawati, SE memulai pendidikannya di SDN 5 Bandarlampung dan tamat Tahun 1971. Menyelesaikan SMPN 2 Tahun 1974 , SMAN 2 Tahun 1977 dan melanjutkan ke jenjang S-1 di Fakultas Pertanian, jurusan Teknik Pertanian Universitas Lampung tahun 1978 dan meraih gelar Insinyur Pertanian pada Tahun 1984, Sebelum menjadi PNS bekerja pertama sebagai Sekretaris Eksekutif Kamar Dagang dan Industri Daerah (KADINDA) Prop Lampung tahun 1984-1985.

Ayah dari 2 orang putra dan 1 putri ini menghabiskan sebagian besar karirnya di dunia birokrasi (1985-2019) dan pada Tahun 2020 terpilih sebagai Komisioner Komisi Informasi Propinsi Lampung Periode 2020-2024, dan dipercaya sebagai Ketua.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di organisasi intra/ekstra kampus : Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) FP UNILA (80-82), Sekretaris I Zero Population Growth (ZPG) Tingkat I Lampung (81-83), Ketua HMI Komisariat FP Unila (80-82), Sekretaris Umum HMI Cabang Tanjungkarang (82-83), dan Ketua Umum HMI Cabang Tanjungkarang (83-84).

Setelah mengabdikan sebagai PNS Ahmad Alwi Siregar tetap aktif di dunia organisasi, yaitu : Wakil Ketua DPD KNPI Prop Lampung (1988-1991), Sekretaris DPW Pemuda Pancasila Prop Lampung (1990-1995), Ketua Biro Pemuda DPD HKTI Tingkat I Lampung (1991-1995), Ketua Biro Organisasi PII Cabang Lampung (1991-1995), Ketua Bagian Satuan Organisasi ICMI Orwil Lampung (1992-1995), Ketua DPC HKTI Lampung Barat (1996-2000), Ketua Bidang Mekanisme Kerja Organisasi ICMI Orwil Lampung (1996-2001), Presidium KAHMI Lampung (2001-2006), Ketua Bidang OKK DPD MAI (Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia) Lampung (2008-2013), Wakil Ketua DPD HKTI Prop Lampung (2008-2013 dan 2013-2018)

Selama meniti karir sebagai birokrat, beberapa jabatan pernah diemban baik di Lingkungan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten. Di Propinsi dalam kurun waktu 1985-1995 menduduki jabatan Esselon 4 Di Subdinas Penyuluhan Dinas Pertanian Propinsi Lampung.

Pada kurun waktu 1995-2005 di Kabupaten Lampung Barat berturut turut pernah menduduki jabatan Kepala Bagian Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pertanian, dan Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Promosi dan Investasi. Pada tahun 2005 kembali ke lingkungan Pemerintah Propinsi sd Juni 2009, berturut turut pernah memegang jabatan sebagai Wakadis Perkebunan, Wakadis PMD, Kepala Sekretariat Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV/AIDS, Kepala Badan Lingkungan Hidup.

Pada Juli 2009 ditugaskan ke Kabupaten Pringsewu sampai dengan pensiun pada september 2019, beberapa jabatan yg diemban secara berturut turut: Inspektur, Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Assisten Sekretariat Daerah Bidang Administrasi Umum.

Dalam kurun waktu menjadi Assisten (2014-2019), juga pernah merangkap sebagai Plt Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pendapatan, dan Kepala BPKAD. Selama bertugas di Kabupaten Pringsewu, dipercaya sebagai Pengawas KPN Jejama Secancangan (2011-2019) dan Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Pringsewu (2014-2019)

Selama bertugas, banyak diklat teknis dan penugasan yg telah diikuti, baik di dalam dan luar negeri. Negara yg pernah dikunjungi dalam tugas/diklat adalah Italia, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapore. Alhamdulillah Ahmad Alwi Siregar dapat menunaikan Ibadah Haji di Makkah Al Mukarromah pada Tahun 2007.

## **2. Erizal, S.Ag**



Erizal dilahirkan di Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 8 September 1972. Tetapi sebagian besar perjalanan hidupnya di mulai di Kota Krui, kabupaten Pesisir Barat dan tahun 1992 hijrah ke Kota Bandar Lampung. Memiliki seorang istri, Titiiek Yuniar, SE dan dua orang putra, Mohammad Fachry Akbar (15) dan Mohammad Rais Ridho (13).

Jenjang pendidikan formal, dilalui di SDN 1 Desa Balai Kencana, kecamatan Krui Selatan kabupaten Pesisir Barat selesai tahun 1996, SMPN 1 Krui selesai 1989, SMAN 1 Krui selesai 1992. Setelah itu melanjutkan ke pendidikan tinggi, IAIN Raden Intan (Sekarang Universitas Islam Negeri Raden Intan) Fakultas Ushuluddin, Jurusan Dakwah selesai 1997.

Aktivitas keorganisasian, dimulai sejak mahasiswa, menjadi wakil ketua HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) Dakwah, Pengurus Senat Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Pendiri dan wakil ketua UKM Bapinda IAIN Raden Intan (1996-1997). Selain itu, Pernah menjadi Ketua Umum DPD IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) provinsi Lampung (2000-2002). Wakil Sekretaris KNPI Provinsi Lampung (2003-2006), Sekretaris Umum Pemuda Muhammadiyah Lampung (2002-2006), Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Muhammadiyah Lampung (2010-2015), Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Lampung (2015-2020), Keluarga Mahasiswa Penerima dan Alumni Penerima Beasiswa Supersemar (KMA-PBS) Lampung. Tim Investigasi Komite SMALAM (Tim Advokasi kasus Warsidi Talangsari). Wakil Sekretaris Bussines Development Services Lampung, Anggota

Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB) Provinsi Lampung. Setelah terpilih menjadi anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung, mengundurkan diri dari semua jabatan publik dan fokus di institusi Komisi Informasi Lampung.

Dalam hal meningkat kapasitas, beliau pernah mengikuti Pelatihan dan training, mulai dari training kepemimpinan, Advokasi dan Paralegal, Jurnalistik, Konsultan keuangan Mitra Bank, Koperasi, UMKM dan Bisnis.

Beberapa pendampingan masyarakat yang pernah dilakukan antara lain Pendampingan korban jamaah Warsidi Talangsari, tim penyelesaian sengketa tanah adat di Tuba dengan Corporate, penyelesaian kasus pedagang bambu kuning, Konsultan Pendamping Hutan Kemasyarakatan (HKm) di desa Bogorejo Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran., Pelaksana Program Modal Awal Padanan (MAP) terhadap kelompok (sentra) Pengrajin Genteng di Pringsewu Tanggamus. (Kerjasama Lembaga KUKM – Kementerian Koperasi UKM dan Koperasi), Pelaksana Program Modal Awal Padanan (MAP) terhadap kelompok (sentra) Pengrajin Mebel di Metro Kibang Lampung Timur. (Kerjasama Lembaga KUKM – Kementerian Koperasi UKM dan Koperasi), Pelaksana Program Modal Awal Padanan (MAP) terhadap kelompok (sentra) Peternak unggas di Kota Metro. (Kerjasama P2ES – Kementerian Koperasi UKM dan Koperasi), Konsultan Pendamping dan Tim Survey Program Kemitraan Bina Lingkungan UPMS II Palembang terhadap UKM dan koperasi di Provinsi Lampung (Kerjasama P2ES – UPMS II Pertamina Palembang), Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir UKM dan Koperasi se-provinsi Lampung, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung. (Kerjasama P2ES – Diskoperindag Provinsi Lampung), Koordinator JPPR (Jaringan Pemilih dan Pendidikan untuk Rakyat) Lampung Utara.

Komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat, menghantarkan beliau ikut pertukaran Pemuda ASEAN – JAPAN, JICA, di Jepang (2003) dengan program *Local Development* dan penghargaan dari KNPI Kota Bandar Lampung, pemuda penggerak ekonomi kerakyatan (2006).

### 3. Dery Hendryan, S.H., S.IP., M.H., Mediator.



Kedua orangtuanya memberi nama Dery Hendryan kepada pria yang lahir di Tanjung Karang, 13 Januari 1976. Suami dari Meilisa, S.H.,M.H. (seorang ASN) menghabiskan seluruh masa pendidikan formal di Provinsi Lampung, diawali menempuh Sekolah Dasar Bakti Persit Tanjung Karang tamat Tahun 1989.

Sekolah Menengah Pertama Negeri diselesaikan di SMPN 5 Tanjung Karang Tahun 1992, dan Sekolah Menengah Tingkat Atas diselesaikan di SMAN 3 Tanjung Karang Tahun 1995. Berlanjut ke pendidikan sarjana (S1) diselesaikan pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung Tahun 2002, pendidikan sarjana (S1) diselesaikan pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Tahun 2010, dan pendidikan magister (S2) diselesaikan pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung Tahun 2004.

Ayah dari Fatiha Nashwa Putri Hendryan (15 tahun) ini, juga berhasil menempuh sejumlah pendidikan non-formal, seperti Diklat Teknis Pencalonan Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2013, Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) DPN PERADI Tahun 2013, Ujian Profesi Advokat DPN PERADI Tahun 2014, Pendidikan Mediator Bersertifikat Sekolah Pascasarjana UGM (mediator umum) Tahun 2015, Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Angkatan Ke-3 Tahun 2016, dan Pendidikan Mediator Administrasi Publik Bersertifikat Sekolah Pascasarjana UGM (mediator lanjutan) Tahun 2018.

Riwayat perjalanan pekerjaan Dery Hendryan, bermula sebagai sebagai Relawan Pemantau Pemilu 1999 Forum Rektor Indonesia Tahun 1999, pada Tahun 2003 - 2008 dipercaya sebagai Komisioner KPU Kabupaten Lampung Selatan, lanjut kembali Tahun 2008 - 2014 dipercaya sebagai Ketua KPU Kabupaten Pesawaran. Sebelum masuk Komisi Informasi Provinsi Lampung, Dery lulus ujian profesi advokat dan dilantik Tahun 2015 dan ditahun yang sama dilantik sebagai Ketua merangkap komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan 2015 – 2020 dan terpilih kembali sebagai Komisioner untuk periode ke-2. Sampai saat ini masih terdaftar sebagai advokat/pengacara dan anggota DPC PERADI Bandar Lampung.

Sejak menjadi mahasiswa S1 medio Tahun 90-an, mantan Presma Unila ini aktif diberbagai organisasi. Mulai dari menjadi pengurus di beberapa organisasi intra dan ekstra kampus seperti, Reporter Magang SKM Teknokra UKPM Teknokra Unila Tahun 1997, Sekretaris Umum BPM FISIP Unila Tahun 1997 – 1998, Tim Carateker SMPT Unila Tahun 1998 – 1999, Gubernur BEM FISIP Unila Tahun 1999 – 2000, Ketua Bidang PPD Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bandar Lampung Tahun 1999 -2000, Koordinator Presidium Nasional ILMISPI (Ikatan Lembaga Mahasiswa Ilmu Politik Sosial Politik se-Indonesia) Tahun 1999 -2000, Presiden BEM UNILA Tahun 2000 – 2001, Ketua SAPMA (Satuan Pelajar dan Mahasiswa) Pemuda Pancasila Provinsi Lampung Tahun 2001 – 2003, Wakil Sekretaris DPD KNPI Provinsi Lampung Tahun 2002 – 2005, Ketua Bidang OKK DPC PERADI Bandar Lampung Tahun 2016-2021, dan Ketua Bidang DPD IKADIN Provinsi Lampung Tahun 2020-2025.

Ada sejumlah tulisan (opini) yang telah dimuat media *meanstream* di Provinsi Lampung. Cuplikan tulisan tersebut diantaranya; Keterbukaan Informasi dan Akuntabilitas Pemilukada (lampost, 7/5/2016), Sengkarut Kebijakan Rekeyasa Lalu Lintas (lampost, 28/7/2016), Semangat RTKD dan Transparansi Desa (lampost, 24/9/2016), Covid-19 dan Keterbukaan Informasi (lampost, 30/4/2020), Kemerdekaan dalam Keterbukaan Informasi (lampost, 19/8/2020), Transparansi Kasus Syekh Ali Jaber (rilis.id.lampung, 8/10/2020), Problem Transparansi Picu Polemik UU Ciptaker (rilis.id.lampung, 25/10/2020), Problem Transparansi Picu Polemik “Omnibus Law”? (radarlampung.co.id, 22/10/2020), dan Transparansi PAD (radarlampung.co.id, 24/6/2021).

#### **4. Muhammad Fuad, S.Sos**



Muhammad Fuad lahir di Jakarta, 31 Agustus 1976. Beralamat di Jl. Teluk Lampung, LK I Pidada Panjang. Suami dari Nur Rahmawati, S.Sos memulai Pendidikannya di SDN 12 Jakarta Timur Tahun 1984-1989. Melanjutkan pendidikan sekolah menengah di SMPN 223 Jakarta Timur 1989-1991. SMA N 88 Jakarta Timur 1991-1994. Melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi SI Fisipol di Universitas Bandar Lampung Tahun 1994-1999

Selama menjadi mahasiswa, aktif di organisasi intra dan ekstra kampus, Sekretaris Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat UBL Tahun 1995, menjadi ketua umum senat fisipol UBL Tahun 1996-1997 dan menjadi Ketua Umum S.M.P.T UBL Tahun 1997-1998.

Ayah dari 3 anak ini memulai karirnya menjadi staff Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bandar Lampung Tahun 2003, menjadi Kepala Operasional LBH Bandar Lampung selama 2 Periode yaitu pada Tahun 2006-2009 dan Periode 2009-2012, menjadi Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2014-2017 dan sekarang menjadi Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung 2020-2024.

## **5. Syamsurrizal, SH.,MM**

Syamsurrizal dilahirkan di Yogyakarta pada 25 Oktober 1960/ Suami dari Herlina Warganegara SE, memulai pendidikannya di TK Kartini Kraton Yogyakarta pada tahun 1965-1966. Melanjutkan Sekolah dasar di SD Negeri 29 Tanjung Karang. SMP Negeri 3 Tanjung Karang. Melanjutkan sekolah di SMA Muhammadiyah I Yogyakarta dan lulus pada tahun 1979. Melanjutkan ke jenjang S-1 di Universitas Lampung dan lulus pada tahun 1985. Melanjutkan ke jenjang Magister di Universitas Timbul Nusantara dan lulus pada tahun 2013. Ayah dari 2 orang Putra dan 1 Orang Putri. Pernah bekerja di Mobil Oil Indonesia sebagai Volunteer Legal Officer pada tahun 1984-1986. Selanjutnya pernah bekerja di PT. Perkebunan X di bagian Bidang Umum Hukum dan Agraria pada tahun 1986-1996. Pernah bekerja di PTP. Nusantara VII sebagai Kepala Bagian Umum dan Pengkajian pada tahun 1996-2006. Pernah menjabat sebagai Direktur Pemasaran dan Rencana Pengembangan di PTP. Nusantara XIV pada tahun 2006-2011. Pernah menjabat sebagai Direktur Umum di PT. Sentral Niaga Pratama pada tahun 2012-2014. Pernah bekerja di PT. Berkat Temiko Indonesia sebagai Direktur Pemasaran pada tahun 2015-2018. Dan saat ini menjabat sebagai Komisioner bagian Penyelsaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, aktif di organisasi Universitas Lampung. Sebagai Ketua Bidang Eksternal Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (1982-1984). Ketua Bidang Koperasi dan Wiraswasta di BPM Universitas Lampung

(1982-1985). Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung sebagai Sekretaris Umum (1981-1984). PERKAPPEN sebagai Sekretaris II PERKAPPEN Wilayah Sumsel (1987-1998). Koperasi Karyawan PTP X Palembang sebagai Ketua Umum Koperasi Karyawan PTP X Palembang (1986 – 1991). Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Lampung sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan pada tahun (2014-2008). Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Provinsi Lampung sebagai Divisi Pengembangan Sumber Daya Pembangunan dan Hukum (2011-2018).

Beberapa ide gagasan yang sudah berjalan yaitu, Langkah percepatan pengalihan akad kredit hutang petani peserta PIRBUN (1987-1988). Penanaman kembali atau replanting tanaman karet dan kelapa sawit petani peserta PIR/PIRSUS (1992-1994). Program perluasan tanaman sawit dengan pekebun sekitar area HGU milik PTP X (1993). Pembuatan pakan ternak dan penggemukan ternak 2002 – 2003. Mengusulkan alternative pembiayaan untuk pendanaan operasional kebun di PTPN VII (2004 – 2005).

#### **D. Visi dan Misi Komisi Informasi Provinsi Lampung**

**Visi :** “Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dalam Rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik”

**Misi :**

- a. Meningkatkan penyelesaian Sengketa Informasi Publik untuk menghasilkan putusan Komisi Informasi yang adil dengan mengedepankan kepentingan publik, bangsa dan negara;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak konstitusionalnya dalam hal keterbukaan informasi publik
- c. Mendorong Badan Publik untuk memberikan layanan informasi yang berkualitas;
- d. Mendorong Badan Publik untuk mempunyai standar layanan informasi publik yang sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pelaksana dan ketentuan lainnya;
- e. Mendorong penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.



Susunan Organisasi Komisi Informasi terdiri dari:

1. Ketua Komisi Informasi
2. Wakil Ketua Komisi Informasi
3. Kepala Divisi Kelembagaan
4. Kepala Divisi Advokasi, Sosialisasi dan Ajudikasi
5. Kepala Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komisi Informasi Provinsi Lampung mendapat dukungan dari Dinas Kominfotik Provinsi Lampung melalui kepala Bidang Pengelolaan dan layanan Informasi Publik, Kepala yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan fasilitasi penyiapan program Komisi Informasi Provinsi Lampung;
2. Penyelenggaraan fasilitasi dan pemberian pelayanan teknis Komisi Informasi Provinsi Lampung;
3. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tinggal dan ketatausahaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tinggal dan ketatausahaan di lingkungan Komisi Informasi Provinsi Lampung.

#### **F. Sumber Daya Manusia (SDM) Komisi Informasi Provinsi Lampung**

No.	Jenis Kepegawaian	Pendidikan								Ket
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	JML	
1.	Komisioner	-	2	3	-	-	-	-	5	
2.	PNS	-	1	3	1	-	1	-	6	
3.	PTHL	-	-	-	-	-	-	-	0	
4.	ASTA	-	2	5	-	-	-	-	7	
5.	Security/OB	-	-	-	-	3	-	-	3	
	Jumlah	-	5	11	1	3	1	-	21	

## G. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan salah satu alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan didalam pelayanan publik, karena apabila hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil maksimal yang diharapkan sesuai dengan rencana. Pada kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung sarana dan prasarana yang dimiliki sudah cukup memadai untuk dapat menunjang kinerja dan tugas tugas kedinasan. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki dan menjadi inventaris kantor adalah :

No	Jenis Barang	Tahun	Merk	Jumlah
1	Kendaraan Roda 4	2017	Innova	1 unit
2	Kendaraan Roda	2017	Vario	1 unit
3	Filling cabinet	2017	Brother B 103	3
4	Meja sidang	2017	Indachi	6
5	Meja helpdesk	2017	Indachi	1
6	Kursi putar	2017	Chitose	5
7	Kursi lipat	2017	Chitose	14
8	Meja computer	2017	Indachi	2
9	Kursi sidang	2017	Indachi	10
10	AC	2017	Sharp AH-A12SEY	3
11	Kipas angin	2017	Regency	1
12	Sound system	2017	Amplifier ZX-12	1
13	Microphone	2017	Ealsen	7
14	Komputer PC	2017	Asus K31AM-1D004D	2
15	Laptop	2017	Hp 14-004A	3
16	Printer	2017	Hp laserjet M 130 A	3
17	Handycam	2017	Sony EOS 1200 D Digital	1
18	Layar proyektor	2017	Acer	1
19	Kamera	2017	Canon	1
20	TV LED	2017	Samsung 32 in	2

# BAB II

## PELAKSANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM

---

### A. Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

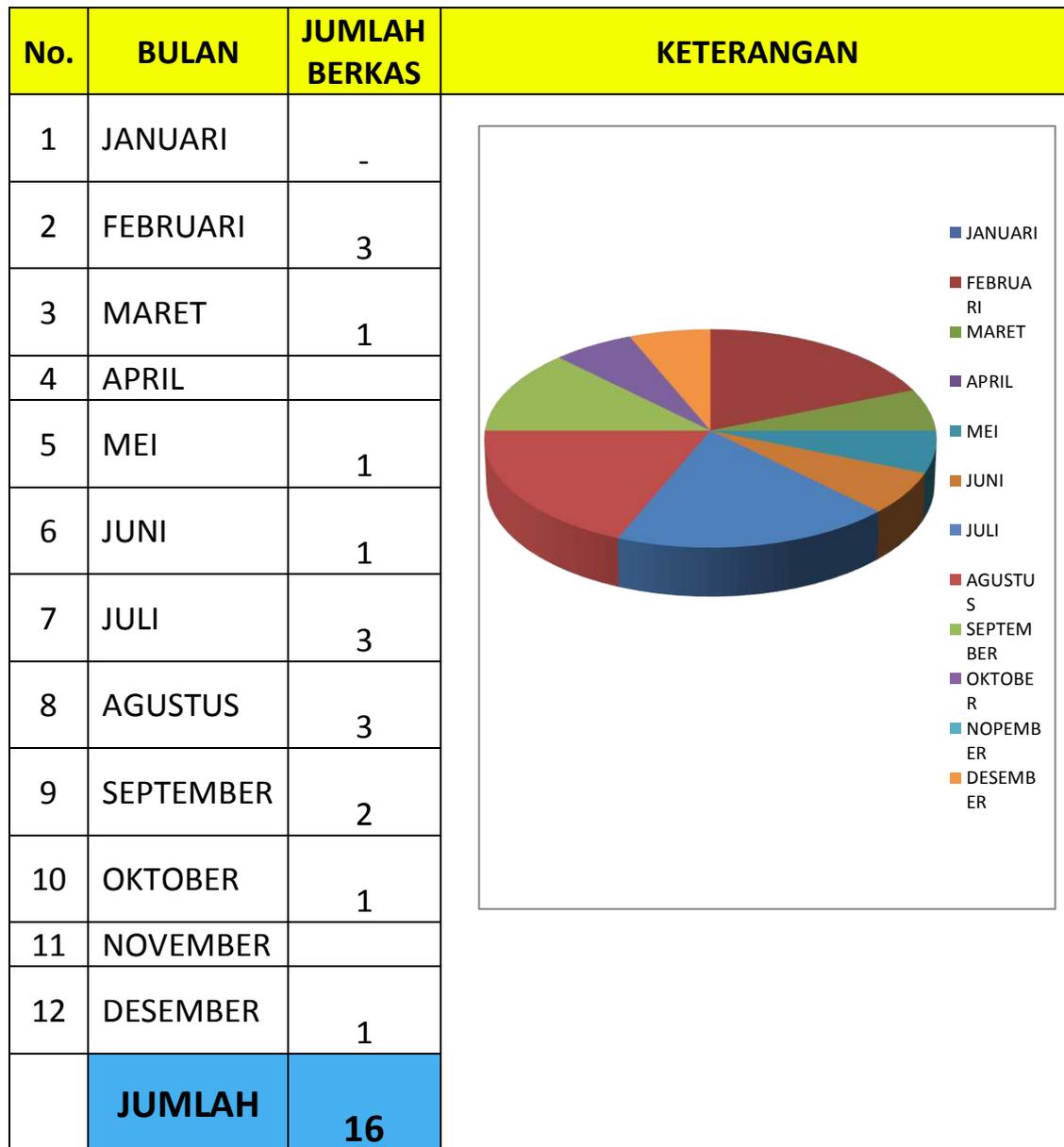
UU KIP mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa informasi publik dimana apabila hak publik untuk mendapatkan informasi publik terhambat atau dihalangi oleh badan publik maka publik bisa mengajukan sengketa informasi publik kepada komisi informasi. Penyelesaian sengketa informasi publik dilaksanakan oleh komisi informasi melalui mekanisme adjudikasi non litigasi serta mediasi. Adjudikasi non litigasi adalah penyelesaian masalah hukum diluar pengadilan yang kekuatannya setara dengan putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam UU KIP.

Namun tidak semua sengketa informasi publik terjadi dikarenakan badan publik belum menjalankan UU KIP, ada berbagai sebab untuk hal itu diantaranya pengecualian informasi dari akses publik yang ditetapkan oleh badan publik karena alasan sebagaimana diatur UU KIP dan UU lainnya sehingga dibutuhkan penyelesaian sengketa informasi melalui pemeriksaan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik di komisi informasi, dominan pengecualian informasi terjadi karena kepentingan untuk melindungi kerahasiaan perusahaan/badan privat ataupun perlindungan data pribadi perorangan.

#### 1. Jumlah Register Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2021

Jumlah permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi pada tahun 2021 yang teregisterdi tahun 2021 termuat dalam statistik pada Grafik 1. Jumlah total permohonan pada tahun 2021 adalah sebanyak 16 permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Grafik 1. Jumlah Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi  
Per Tahun 2021



Berdasarkan grafik diatas bahwa Permohonan penyelesain sengketa di Komisi Informasi Provinsi Lampung terdapat 16 Permohonan Penyelesaian sengketa selama Tahun 2021 yang telah selesai diputus sejumlah 15 perkara dan yang masih dalam proses berjumlah 1 perkara.

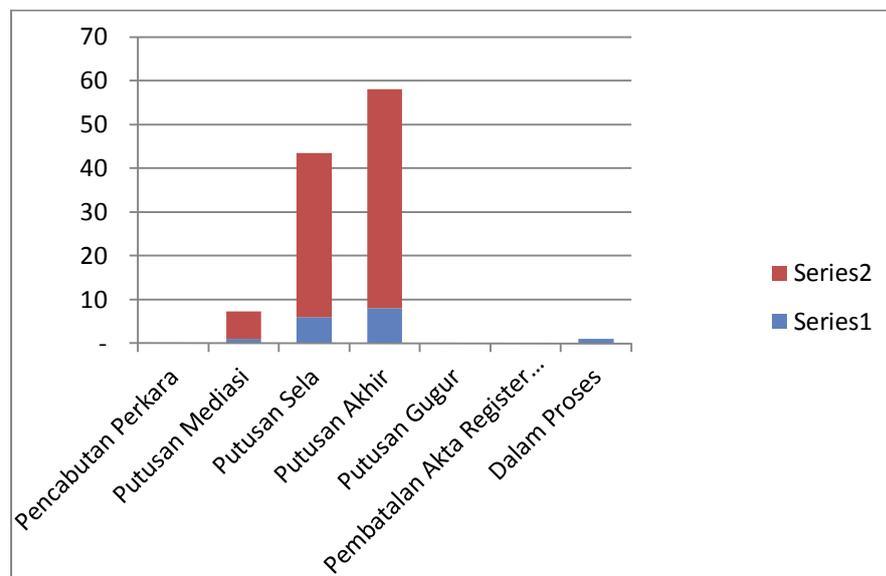
## **2. Jenis Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2021**

Jenis putusan penyelesaian sengketa informasi publik dari permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ada 4 jenis putusan untuk penyelesaian sengketa informasi publik yaitu :

- a) Putusan Mediasi bila mediasi para pihak yang difasilitasi mediator berhasil mencapai kesepakatan keseluruhan atau sebagian dan kemudian hasil mediasi/kesepakatan para pihak itu dikuatkan dalam putusan majelis komisioner.
- b) Putusan sela/gugur apabila permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima kemudian di periksa oleh majelis komisioner dalam pemeriksaan awal tidak memenuhi salah satu, sebagian atau keseluruhan mengenai kewenangan Komisi Informasi, legal standing para pihak serta jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik maka majelis komisioner menjatuhkan putusan sela sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Gugurnya permohonan bisa juga dikarenakan pemohon atau kuasanya tidak hadir dua kali tanpa alasan jelas.
- c) Putusan penetapan apabila permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima kemudian di periksa oleh majelis komisioner kemudian dicabut oleh pemohon dikarenakan permohonannya telah terpenuhi. Pencabutan permohonan yang sudah diregister dan disidangkan wajib untuk dibuatkan putusan penetapan oleh majelis komisioner yang menerima, memeriksa dan memutus permohonan tersebut untuk kemudian mengeluarkan putusan penetapan memerintahkan panitera mencabut register permohonan dari register permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi sebagaimana diatur pada pasal 15 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
- d) Putusan ajudikasi non litigasi / putusan akhir yaitu putusan penyelesaian sengketa informasi publik setelah melalui beberapa

tahapan sesuai hukum acara komisi informasi yaitu bisa dikarenakan para pihak dalam pertemuan mediasi gagal mencapai kesepakatan sehingga penyelesaian sengketa dilanjutkan ke tahap pembuktian, pemeriksaan saksi/ahli hingga kesimpulan para pihak, bisa juga dikarenakan objek sengketa informasi adalah termasuk informasi yang dikecualikan sehingga perlu pemeriksaan lebih lanjut terkait uji konsekuensi dan uji kepentingan publik atas informasi yang dikecualikan tersebut oleh majelis komisioner yang menerima dan memeriksa permohonan sebelum memutus / menyelesaikan sengketa informasi dimaksud.

Grafik 2. Jenis Penyelesaian Sengketa Informasi Tahun 2021



Pada Tahun 2021 permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang selesai ditangani / diputus oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung berdasarkan Grafik 2. Jenis penyelesaian sengketa informasi dari 16 Permohonan diselesaikan melalui : Putusan Sela/Gugur sebanyak 6 Perkara, Putusan Akhir 8 perkara , dan Putusan Mediasi 1 perkara dan 1 perkara masih dalam proses penyelesaian sengketa.

### 3. Jenis Permohonan Informasi yang disengketakan tahun 2021

Permohonan penyelesaian sengketa informasi memiliki bermacam-macam jenis informasi yang disengketakan, tahun 2021 jenis informasi yang

disengketakan meliputi : Dana desa, Pertanahan, Perpajakan, dan Pengelolaan lahan parkir.

Nomor	Jenis Informasi	Jumlah
1	Dana Desa	12
2	Pertanahan	1
3	Perpajakan	2
4	Pengelolaan parkir	1
		<b>16</b>

#### 4. Rekapitulasi Majelis Komisioner dalam Penyelesaian sengketa Informasi tahun 2021

Proses penyelesaian sengketa informasi yang diselesaikan melalui Adjudikasi non litigasi perlu ditetapkan Majelis Komisioner oleh ketua Komisi Informasi untuk memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik. Mediator yang bertugas membantu para pihak dalam perundingan penyelesaian sengketa informasi dan Panitera/Panitera pengganti yang bertanggungjawab mengelola administrasi permohonan penyelesaian sengketa, membantu Mediator, membantu majelis Majelis Komisioner dalam persidangan, mencatat persidangan, membuat Berita Acara Persidangan dan menyusun laporan hasil persidangan.

Dalam pelaksanaannya Tahun 2021 jumlah rekapitulasi Majelis komisioner dan panitera pengganti sebagai berikut :

Nomor	Nama	Ketua	Anggota	Mediator
1	Ir. Ahmad Alwi Siregar	2	8	4
2	Erizal, S.Ag	4	6	6
3	Dery Hendriyan, S.I.P.,S.H.,MH, Mediator	2	1	-
4	Syamsurrizal, SH.,MM	5	7	4
5	Muhammad Fuad, S.Ag	3	10	1
	<b>Jumlah</b>	<b>16</b>		

Nomor	Nama	Jumlah
1	Miftahul Mu'izz, M.Pd.,Mediator	4
2	Feby Yustika Sari, MH.,Mediator	3
3	Yuli Kurniawati, S.Pd.,Mediator	1
4	Ria Fatimah, S.Pd.,Mediator	2
5	Fitria Sari, S.Pd.,Mediator	1
6	Basuki, SH.,Mediator	4
7	Alva Reza Zeanprianti, S.Kom	1
		<b>16</b>

## 5. Dokumentasi Persidangan Sengketa Informasi 2021



Sidang sengketa Informasi antara Jurnalis Nasional Indonesia dengan Dinas Sosial Kabupaten Pesawaran tanggal dihadiri oleh Pemohon Aung Sugenta dan Termohon Drs. M. Iqbal, M.M Plt selaku Dinas Kabupaten pesawaran





Sidang sengketa informasi Publik antara Riksan Aripin dengan kantor DJP Provinsi Lampung dengan Ketua Majelis Komisioner Dery Hendryan, S.IP., SH., MH., Mediator dengan anggota Syamsurrizal, SH., MM dan Muhammad Fuad, S.Sos., Mediator





Sidang sengketa informasi antara Pemantau keuangan Negara dengan Kepala Desa Sukasari Kecamatan Tanjung Raja Lampung Utara dengan susunan majelis Muhammad Fuad, S.Sos.,Mediator dan anggota Ir.Alwi Siregar dan Erizal, S.Sos.,Mediator



## **B. Divisi Sosialisasi dan Edukasi**

Komisi Informasi Provinsi Lampung memiliki peran dalam melakukan sosialisasi dan edukasi tentang keterbukaan Informasi Publik kepada masyarakat dan Badan Publik. Peran ini sangat membantu masyarakat untuk mengetahui tata cara mengakses Informasi Publik sekaligus Badan Publik dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dengan adanya tata kelola yang baik dalam memberikan pelayanan Informasi Publik, maka masyarakat dapat lebih mudah dalam mengakses Informasi Publik.

Kegiatan bimbingan teknis tentang keterbukaan informasi publik dengan ormas, NGO dan juga BEM Universitas dan juga osis dan kerjasama dengan berbagai lembaga serta menjadi narasumber dalam kegiatan kabupaten/kota sebagai upaya salah satu upaya Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam mensosialisasikan UU KIP, baik dalam konteks sosialisasi eksistensi Komisi Informasi Provinsi Lampung beserta tugas pokok dan fungsi maupun sosialisasi lainnya terkait dengan implementasi keterbukaan informasi publik dalam konteks hak dan kewajiban Badan Publik dan masyarakat.

Pada tahun ini, target pencapaian Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam Sosialisasi dan Edukasi sebagai berikut :

1. Ketua dan anggota Komisi Informasi menerima audiensi dengan Jurnalis Nasional Indonesia (JNI) Provinsi Lampung di kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung pada Selasa siang, 25 Mei 2021 pukul 13.30 WIB. Dalam pertemuan ini, Ketua Komisi Informasi Ir. Alwi Siregar mengaku senang atas kehadiran JNI dan semoga ke depannya bisa bekerjasama serta kemitraan. Selanjutnya, beliau menceritakan tentang berdirinya Komisi Informasi, visi, misi maupun Pelantikan anggota KI. Sementara itu, Ketua DPW JNI Lampung Agung Sugenta Inyuta, S.Kom yang diwakili oleh anggotanya menuturkan dengan audiensi ini kita bersama bisa bersilaturahmi, berdiskusi berbagi serta menjalin kerjasama ataupun kemitraan.



2. Institut Teknologi Sumatera (ITERA) melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sepakat berkolaborasi dengan Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik di Perguruan Tinggi. Sebagai kampus berbasis sains dan teknologi, ITERA diharapkan menjadi kampus percontohan dalam menciptakan teknologi dan inovasi di bidang layanan informasi publik yang sesuai kebutuhan zaman. Kesepakatan untuk saling kolaborasi tersebut disampaikan Ketua Komisi Informasi Lampung, Ir. Ahmad Alwi Siregar, saat menerima audiensi Tim PPID ITERA di Kantor KI Lampung Jumat, 25 Juni 2021. Ketua KI Lampung juga didampingi komisioner KI Lampung: Erizal, S.Ag, Dery Hendryan, S.IP.,S.H.,M.H, Syamsurrizal, S.H.,M.M dan Muhammad Fuad, S.Sos.





3. Pada hari Selasa, 27 Juli 2021 Komisi Informasi Provinsi Lampung (diwakili Ir. Ahmad Alwi Siregar dan Erizal.S.Ag) mengikuti uji publik dan FGD (Focus Grup Discussion) penyempurnaan Draft PERKI yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi ikut melalui virtual Zoom Meeting pelampiran draf PERKI kelembagaan disampaikan oleh Muhammad Syahyan (Komisioner Bidang Edukasi Dan Kebijakan Publik Komisi Informasi Pusat). Sedangkan penanggapi dari akademi yaitu: M.Imam Nasef, S.H., M.H. (Akademi USKIP dan Dr.Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H (Akademi UPI). Acara Uji Publik dan FGD di buka oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Hendra J. Kede.
4. Pada Hari Selasa, 27 Juli 2021 Wakil Ketua Komisi Informasi Lampung Erizal, S.Ag. Menjadi Narasumber pada diskusi yang di gelar oleh KPU Bandar Lampung secara virtual yang berjudul “Beri Pendidikan Pemilih Literasi Demokrasi dan Kepemiluan”. Selain Wakil Ketua Komisi Informasi Lampung narasumber lainnya adalah Fery Triatmojo (KPU Bandar Lampung) dan Yoso Muliawan (Tribun Lampung).
5. Pada hari Selasa, 23 Agustus Pukul 14.30 WIB Komisioner Komisi Informasi Lampung Muhammad Fuad, S.Sos. menjadi Narasumber pada online *Zoom Meeting* dalam rangka pendidikan kemahiran Advokat (PKA) oleh DPD IKADIN kerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Metro dengan tema “ Kemahiran Sengketa Informasi Publik“ .

6. Pada hari Selasa, 31 Agustus 2021 Pukul 09.00 WIB dilaksanakan Penandatanganan secara simbolis MOU antara Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dan Komisi Informasi Provinsi Lampung yang dilaksanakan secara virtual. Setelah acara Penandatanganan MOU dilanjutkan dengan Webinar Keterbukaan Informasi Publik ITERA Tahun 2021 dengan tema : “Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik di Masa Pandemi Covid-19” bertindak selaku pembicara adalah :
1. Arif Adi Ruswandono (Komisioner Komisi Informasi Pusat)  
Topik : Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik di Masa Pandemi Covid- 19
  2. Ir.Ahmad Alwi Siregar ( Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung)  
Topik : Pentingnya Menjadi Kampus Yang Terbuka



7. Pada hari Kamis, 2 September 2021 pukul 08.00 WIB Erizal S.Ag. selaku Wakil Ketua Komisi Informasi Lampung sebagai narasumber dialog yang dilaksanakan RRI Bandar Lampung FM 90.9 MH2 dengan topik : “Implementasi Undang- undang Keterbukaan Informasi di Perguruan Tinggi Lampung”.Selain dari Komisi Informasi Lampung yaitu ITERA : drh. Sri Sulistiawati MM.

8. Pada hari Kamis, 2 September 2021 pukul 19.00 WIB Komisi Informasi Lampung menerima kunjungan konsultasi dari Kadis Kominfo Kabupaten Lampung Tengah ( Bapak Rosyadi) dan staf tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Badan Publik Kunjungan diterima oleh Komisiner Komisi Informasi Lampung Muhammad Fuad S.Sos., dan Asisten Tenaga Ahli Komisi Informasi Lampung : Basuki, S.H.
  
9. Pada hari Kamis, 9 September 2021 pukul 13.00 WIB Komisi Informasi Lampung menerima kunjungan silaturahmi dari PTPN-7 Bandar Lampung, diwakili oleh Bambang Wartawan selaku Sekretaris Direksi dan Hendri Tujuan Kunjungan untuk mengembangkan perubahan sistem mengajukan posisi terkait Keterbukaan Informasi di perubahan PTPN-7 beberapa agenda yang menjadi diskusi dengan para Komisioner diantaranya kesiapan keikutsertaan PTPN-7 dalam Pemeringkatan Badan Publik (Anugerah Keterbukaan Informasi)
  - Perbaikan / Pengembangan Kualitas website PTPN-7
  - Kemungkinan Mengikuti Kerjasama
  - Edukasi Keterbukaan Informasi bagi PPID dan pejabat /petugas PTPN-7



10. Pada hari Jum'at, 10 September 2021 pukul 08.30 s/d pukul 15.30, Komisioner Komisi Informasi Lampung yaitu Dery Hendryan, S.I.P.,S.H.,M.H.Med. dan Muhammad Fuad S.Sos. menjadi narasumber pada Focus Group Discussion (FGD) Keterbukaan Informasi Publik di Pemkab. Kabupaten Lampung Tengah FGD diikuti oleh Pemkab Lampung Tengah dengan materi yang disampaikan meliputi :
  - Keterbukaan Informasi Publik secara Umum

- Permohonan Informasi ke Badan Publik sampai dengan penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi.



11. Pada hari Selasa, 28 September 2021 pukul 09.00 WIB dilaksanakan FGD Keterbukaan Informasi Publik dalam rangka peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia Tahun 2021 dengan tema “Membangun Sinergitas Keterbukaan Informasi Publik Untuk Indonesia Maju dan Berintegritas”.

Narasumber yang hadir sesuai yang direncanakan :

1. Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si
2. Muhammad Fuad, S.Sos

FGD dibuka langsung oleh Kadis Kominfotik Ganjar Jationo, S.E., M.A.P dengan hasil FGD :

- perlu adanya Kolaborasi antara Komisi Informasi, Media, Perguruan Tinggi dan Komponen Masyarakat sipil
- ada role model yang perlu dilaksanakan untuk melakukan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik secara berkesinambungan.



12. Pada hari Selasa, 5 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB dilaksanakan FGD Keterbukaan Informasi Publik yang merupakan kegiatan rangkaian peningkatan hari Hak Untuk Tahu Sedunia tahun 2021. Narasumber yang hadir dalam FGD tersebut :

1. Dr. Budiyono, S.H.,M.H.,CRA.,CRP dengan topik “Pelibatan Masyarakat dalam Informasi Publik”
2. Syamsurrizal, S.H.,M.M dengan topik “Peran Mahasiswa Dalam Mendorong Keterbukaan Informasi Publik”

Hasil FGD tersebut adalah perlu dilakukan peningkatan sosialisasi Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dengan melibatkan mahasiswa, pemerintah, dan pelajar.



13. Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB Komisi Informasi Provinsi Lampung melakukan diskusi dan pembahasan kolaborasi antara Komisi Informasi dengan Komunitas Aksi Milenial Lampung dan relawan TIK Lampung hadir pada acara tersebut : Ketua Komisi Informasi Lampung, Komisioner Komisi Informasi Muhammad Fuad. Sedangkan dari Komunitas Aksi Milenial Lampung : Ridwan Aulia ( Pembina ), Rafi Punjabi ( Ketua ), Alvi ( Sekretaris ) dan Rifky Indrawan ( Ketua Relawan TIK Provinsi ) dan Ali Itafio ( Ketua Relawan TIK Bandar Lampung ). Dari diskusi yang dilakukan , disepakati untuk melaksanakan aksi bersama Keterbukaan Informasi dan literasi digital akan di Desa Wonodadi, Kecamatan Gading Rejo , Pringsewu atas pertemuan dengan kordinasi melalui yang ada di setiap kelurahan/kecamatan Kota Bandar Lampung.



14. Pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 pukul 09.00 Ketua Komisi Informasi Lampung Ir.Alwi Siregar didampingi wakil ketua Erizal S.Ag dan kordinator PSI Syamsurrizal, S.H.M.M menerima kunjungan 2 orang siswa SMA Kebangsaan Kalianda ( Muhammad Fachry Akbar dan Rizky Ramadhani ) untuk menambah wawasan tentang Keterbukaan Informasi. Setelah beberapa saat mereka menyelesaikan pendidikan dasar kedisiplinan dan kependamping di sekolah mereka selama 6 minggu.

15. Pada hari senin, 25 Oktober 2021 pukul 10.00 Komisi Informasi Lampung menerima kunjungan Sekretaris Komisi Informasi I DPRD Banten ibu Hj.Ida Hamidah dari Komisi Informasi Lampung Ketua Ir.Alwi Siregar didampingi oleh kordiv PSI Syamsurrizal,S.H.M.M dan Kordiv Sosialisasi Dan Edukasi Muhammad Fuad S.Sos kunjungan terkait dengan Program dari Anggaran Komisi Informasi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan perubahan APBD 2021.



16. Pada hari Jum'at, 29 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB Komisioner Komisi Informasi Lampung (Muhammad Fuad, S.Sos ) menjadi narasumber pada kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS) SMA 2 Kota Bandar Lampung dengan materi “Pelajaran Anti Hoax di Era Keterbukaan Informasi Publik”.

17. Pada hari Minggu s.d Selasa (31 Oktober s.d 2 November 2021) Komisi Informasi Pusat mengadakan Launching Index Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Provinsi Lampung dihadiri oleh Wakil Ketua Erizal, S.Ag. Yang dilaksanakan di Hotel Novotel Suits, Jl.Malioboro No 5258 Yogyakarta. Acara pembukaan dilaksanakan pada tanggal 1 November 2021 pukul 09.00 WIB secara daring Launching IKIP yang diikuti juga oleh Komisioner Komisi Informasi Syamsurrizal, S.H.,M.M. di isi juga dengan diskusi panel yang menghadirkan narasumber antara lain :

- Dave Laksono (Komisi I DPR-RI)
- Prof. Panut Mulyono (Rektor UGM )
- Gaudiens Suhardi (Pimpinan Redaksi Media Indonesia )
- Yosep Adi ( Tenaga Ahli IKIP )

- Romanus Ndav Lendong ( Komisioner Komisi Informasi Pusat )



18. Pada hari Rabu, 10 November 2021 Kanwil BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung melakukan kunjungan ke kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung. Dalam kunjungan kerja tersebut dihadiri oleh Asdep SDM dan UKP Kanwil BPJS Kesehatan Banten, Kalimantan Barat, dan Lampung Bapak Basuki didampingi staf Frieska Ayu Mutiara dan staf Komisi & Hukum Cabang Lampung Mudayanto. Kunjungan tersebut dalam rangka membicarakan, upaya penguatan PPID BPJS, kemajuan yang telah dicapai dan pengembangannya kedepan sekaligus juga mengundang Komisi Informasi Lampung untuk menjadi salah satu narasumber dan pertemuan Internal BPJS Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung di Hotel Radison Bandar Lampung.



19. Pada hari Kamis, 11 November 2021 pukul 09.00 Ketua Komisi Informasi Lampung Ir.Ahmad Alwi Siregar menjadi narasumber pada kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dikrektorat Perluasan dan Pelayanan serta di KEDEPUTIAN BPJS Kesehatan Wilayah Banten, Kalimantan Barat dan Lampung Radisson Hotel. Materi yang disampaikan pada pertemuan tersebut

“Implementasi Keterbukaan Informasi Publik“ yang dilakukan dalam memperkuat PPID di Lingkungan BPJS Kesehatan.



20. Pada Tanggal 17 s.d 20 November Komisi Informasi Lampung mengirim 3 orang personal ( 2 Komisioner + 1 Asisten Tenaga Ahli ) Komisi Informasi Lampung Mengikuti Bimtek Mediator Bersertifikat yang dilaksanakan oleh Pusat Mediasi Indonesia Universitas Gaja Mada ( PMI UGM )

Materi Bimtek Mediasi ini antara lain :

1. Pengenalan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan
2. Pengantar Mediasi
3. Teknik & Keterampilan Mediator
4. Teknik Analisis Konflik
5. Negosiasi

6. Role Play Simulasi Mediasi
7. Penyusunan Kesepakatan Perdamaian

21. Pada hari Rabu, 17 November 2021 pukul 13.00 WIB Komisioner Komisi Informasi Lampung Syamsurrizal, S.H.M.M. menghadiri acara “Pelantikan Serah Terima Jabatan Direktur LBH Bandar Lampung Periode 2021 – 2025” bertempat di BAPELKES Badan Kesehatan terpilih selaku Direktur : Indra.S.H., M.M.

22. Pada hari Jum’at, 19 November 2021, Komisioner Komisi Informasi Lampung (Syamsurrizal,S.H.,M.M.) menghadiri undangan dari Bawaslu Lampung kegiatan rapat Koordinasi Evaluasi Pilkada 2020 dan Proyeksi persiapan PEMILU Serentak Tahun 2024 di Provinsi Lampung ; yang dilaksanakan di Hotel Novotel Bandar Lampung yang di hadiri oleh staf dari Komisi Informasi Lampung, Yaitu : Miftah, Asisten Tenaga Ahli Komisi Informasi Lampung.





23. Pada hari Sabtu, 20 November 2021 Ketua Komisioner Komisi Informasi (Ir.Ahmad Alwi Siregar) menjadi narasumber pada rapat Kordinasi penyelenggaraan Aplikasi PPID Integritasi Bawaslu Provinsi Lampung Tahun 2021 bertempat di Hotel Golden Tulip dengan tema Standar Layanan Informasi Publik.



24. Pada hari Senin, 22 November 2021 pukul 10.00 WIB Komisi Informasi Provinsi Lampung menerima kunjungan Audiensi Dewan Cabang (DPC) Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Lampung Barat Rombongan DPC,PWRI Lambar dipilih oleh Ketuaanya Yudi Hutriwinata,S.Kom, didampingi oleh Tamam Mulhadi,S.H. selaku Sekretaris (Wakil Ketua) dan pada audiensi tersebut pembahasan lebih banyak piutang materi pelayanan informasi di jasa publik dan Proses Penyelesaian Sengketa di Komisi Informasi.

25. Pada hari Kamis, 16 Desember 2021 pukul 09.00 WIB Komisioner Komisi Informasi Lampung Syamsurrizal S.H.,M.M. menghadiri undangan Sosialisasi Metode Baru Perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Badan Kesehatan di Kantor DPD tersebut. Dalam metode Baru ini memasukan Indikator Ekonomi dan Sosial.

### **C. Divisi Advokasi dan Monev**

Guna optimalisasi tupoksi Komisi Informasi Provinsi Lampung dipandang perlu untuk membentuk divisi baru yakni Divisi Advokasi, Monitoring, dan Evaluasi yang biasa disebut Divisi Advokasi dan Monev. Peran advokasi menekankan pada memberi bantuan (advokasi) kepada Badan Publik dan masyarakat untuk sama-sama menunaikan hak dan kewajiban sesuai amanah UU KIP. Advokasi yang dilakukan berupa problem Badan Publik atas implementasi UU KIP dan akses masyarakat atas informasi dan/atau data yang dimiliki oleh Badan Publik.

Namun akibat Pandemi Covid-19 dan refocusing maka anggaran kegiatan pemeringkatan atau populer disebut “Anugerah KI Lampung” Tahun 2021 tidak bisa dilakukan seperti tahun sebelumnya. Giat advokasi dan monev sebagai ikhtiar memastikan dan mendorong setiap Badan Publik wajib mengumumkan, menyediakan, mendokumentasikan, melayani informasi publik dan membentuk PPID serta menetapkan SOP SLIP. Tahun ini, Komisi Informasi Provinsi Lampung melakukan evaluasi berupa pengumpulan salinan laporan layanan informasi publik oleh setiap Badan Publik yang ada di wilayah hukum Provinsi Lampung sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara giat monitoring oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung menasar ke sejumlah Badan Publik, sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 melalui media Radar Lampung.co.id, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung Dery Hendryan, S.I.P.,S.H.,M.H. Med menulis opini dengan judul “Keterbukaan Merdeka dari Pandemi”.

Pada opini tersebut dikemukakan bahwa ada acara untuk merdeka dari pandemi Covid-19 yang harus dilakukan Pemerintah bersama-sama masyarakat sipil, yaitu :

Pembatasan sosial (y), Peningkatan testing dan tracing (2) ; Protokol kesehatan 4M (3) dan gerakan percepat Vaksinasi (4).

2. Pada hari Rabu, 29 September 2021 Pukul 08.00 WIB Komisioner Komisi Lampung Dery Hendryan menjadi narasumber pada dialog interaktif PRO 1 RRI Bandar Lampung FM 90.9 MHz dalam rangka peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia dengan tema “Momentum Keterbukaan Informasi”.



3. Pada tanggal 06 Oktober 2021 berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan diterima oleh Bupati Nanang Ermanto pukul 10.00 WIB, didampingi Kepala Dinas terkait.





4. Tanggal 13 Oktober 2021 ke Pemerintah Kabupaten Pringsewu. Diterima oleh Bupati Pringsewu H.Sujadi pukul 09.00 WIB, didampingi Kepala Dinas Terkait



5. Tanggal 19-20 Oktober 2021 berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Diterima oleh Wakil Bupati Mad Hasnurin pukul 09.00 WIB, didampingi Kepala Dinas terkait. Setelah pertemuan, Komisioner Komisi Informasi sempat bertemu dengan Bupati Farosil Mabsus.



6. Tanggal 26-27 Oktober 2021 berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat. Diterima oleh Wakil Bupati A. Zulqoini Syarif, S.H. pukul 09.00 WIB didampingi oleh Kepala Dinas terkait.





7. Pada tanggal 28 s.d 30 Oktober 2021 Komisioner Komisi Informasi Lampung (Dery Hendryan,S.I.P., S.H.,M.M.,Med dan Syamsurrizal, S.H.M.M) mengikuti Rakornas ke 12 Komisi Informasi se Indonesia bertempat di Antria Hotel Gading Serpong, Tangerang, Banten. Dan Rakornya diawali dengan Pembukaan acara di seminar “Memulihkan Ekonomi Melalui Keterbukaan Informasi Publik Menuju Indonesia Maju dan Sejahtera“. Rakornas membahas agenda Internal dan Eksternal selain mengikuti secara online. Rakornas Komisi se-Indonesia raya diikuti secara daring untuk Komisi Informasi Provinsi Lampung yang mengikuti secara daring Ir.Alwi Siregar dan Erizal, S.Ag.



8. Tanggal 1 November 2021 berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Diterima pada pukul 11.00 WIB oleh Asisten 3 bidang Administrasi Umum mewakili Bupati Lampung Utara, didampingi Kepala Dinas terkait.



9. Tanggal 5-6 November 2021 berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Way Kanan. Diterima oleh Bupati Raden Adipati Surya pukul 08.00 WIB yang didampingi Kepala Dinas terkait.





10. Tanggal 24 November 2021 berkunjung ke Pemerintah Kota Bandar Lampung. Diterima oleh Plt. Sekretaris Kota Tole Dailami pukul 09.30 WIB didampingi Kepala Dinas terkait.





11. Komisioner Komisi Informasi Lampung Dery Hendryan, S.I.P., M.H.M.M., Med Pada hari Senin, 06 Desember 2021 pukul 13.00 menghadiri acara penyerahan Anggaran Keterbukaan Informasi Publik bertempat Jawa Barat Tahun 2021 bertempat di Gedung Sate, Jl. Diponegoro No. 22 Bandung. Hasil Monitoring, Evaluasi dan pemeringkatan Penerapan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik di Jawa Barat Tahun 2021 terdiri dari 28 Kategori.

# PENUTUP

---

Demikian laporan tahunan komisi informasi Provinsi Lampung Tahun 2021 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang yang diberikan undang-undang Keterbukaan Informasi Publik dan bentuk pertanggungjawaban Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam mengawal Keterbukaan Informasi di Lampung. Laporan ini juga dimaksudkan sebagai bentuk komitmen Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagai lembaga yang diberikan fungsi untuk melaksanakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya untuk terus mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia.

Bandar Lampung, Januari 2022

## KOMISI INFORMASI LAMPUNG

Ir. Ahmad Alwi Siregar

(.....)

Erizal, S.Ag., Mediator

(.....)

Dery Hendryan, S.I.P., S.H., M.H., Mediator

(.....)

Syamsurrizal, S.H.,MM.

(.....)

Muhammad Fuad, S.Sos., Mediator

(.....)

REALISASI FISIK DAN KEUANGAN REGIATAN OPTIMALISASI KELEMBAGAAN TAHUN 2023

No	Kode Rekening										Uraian	Anggaran	REALISASI		Gisa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	12		13
1	2	16	02	01	11	5	1	2	01	01	24	PENGLOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMDA PROVINSI	1.514.497.000	1.514.497.000	100%	-
2	2	16	02	01	11	5	1	2	01	01	24	Belanja Alat/Bahan ATK	8.952.200	8.952.200	100	-
3	2	16	02	01	11	5	1	2	01	01	26	Belanja Alet Bahan Cetak	23.450.400	23.506.400	92	1.950.000
4	2	16	02	01	11	5	1	2	01	01	27	Belanja Alat/Bahan Senda Pos	1.795.000	1.790.000	100	5.000
7	2	16	02	01	11	5	1	2	01	01	52	Belanja Makan Minum Rapat	6.000.000	6.000.000	100	-
8	2	16	02	01	11	5	1	2	01	01	65	Belanja Pakaian Sipil resmi	76.875.000	75.900.000	99	975.000
9	2	16	02	01	11	5	1	2	02	01	3	Honorarium Narasumber, Moderator, MC dan Panitia	20.000.000	19.900.000	100	100.000
10	2	16	02	01	11	5	1	2	02	01	29	Belanja Jasa tenaga Ahli	1.139.500.000	1.104.000.000	97	95.500.000
11	2	16	02	01	11	5	1	2	02	01	30	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	18.000.000	18.000.000	100	-
12	2	16	02	01	11	5	1	2	02	01	31	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	42.000.000	28.800.000	69	11.200.000
13	2	16	02	01	11	5	1	2	02	01	55	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Promotran	21.750.000	21.750.000	100	-
14	2	16	02	01	11	5	1	2	02	01	60	Belanja Air	7.580.000	6.096.110	79	1.583.890
21	2	16	02	01	11	5	1	2	02	01	61	Belanja Listrik	96.001.000	91.721.150	95	4.279.850
22	2	16	02	01	11	5	1	2	02	01	63	Belanja Kawat/Fax/Internet/TV Berlangganan	6.006.000	4.982.080	83	1.023.920
24	2	16	02	01	11	5	1	2	02	01	67	Belanja pembayaran pajak, bea dan perijinan	3.148.000	1.599.250	51	1.548.750
25	2	16	02	01	11	5	1	2	03	05	9	Belanja Sewa, bangunan gedung, tempat pertemuan	12.960.000	12.960.000	100	-
26	2	16	02	01	11	5	1	2	02	12	8	Belanja Bimbingan Teknis	27.000.000	24.000.000	-	3.000.000
27	2	16	02	01	11	5	1	2	03	02	35	Belanja Pemeliharaan Alat Angkut/Service Kendaraan Dinas	37.370.000	37.370.000	100	-
28	2	16	02	01	11	5	1	2	03	02	120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor/Alat Kebersihan	10.825.800	10.825.000	100	800
29	2	16	02	01	11	5	1	2	03	02	121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor/Alat Pendingin/Komputer	10.483.000	10.110.000	96	370.000
30	2	16	02	01	11	5	2	2	10	01	8	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	4.694.000	4.594.000	98	100.000

Lampiran 2

DAFTAR PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2021

No	Nomor sengketa /Tanggal	Pemohon	Termohon	Informasi yang disengketakan	MK	Hasil
1	001/II/KIProv-LPG-PS/2021 17 Februari 2021	Pemantau Keuangan Negara Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi.	Kepala Desa Negeri Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran tahun 2018 dan Tahun 2019</li> <li>2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2018 dan tahun 2019 disertai dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Catatan atas laporan keuangan.</li> <li>b. Laporan realisasi kegiatan; dan</li> <li>c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Tahun anggaran 2018 dan Tahun 2019</li> </ol> </li> <li>3. Daftar Invebtaris Asset asset Desa</li> <li>4. LPJ BUMDes dan Usaha-usaha desa lainnya</li> <li>5. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT dana Desa APBN Tahun 2020 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana kegiatan dan Anggaran Desa</li> <li>2) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan Rencana Anggaran Biaya</li> </ol> </li> <li>b. Daftar Penerima Bantuan</li> <li>c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</li> </ol> </li> <li>6. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar sumber anggaran dan Jumlah anggaran</li> <li>b. Rencana Kegiatan</li> <li>c. Rencana Anggaran Biaya</li> <li>d. Daftar Penerima bantuan</li> <li>e. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Ketua :</b> Muhammad Fuad,S.Sos, Mediator</p> <p><b>Anggota :</b> Syamsurrizal,SH.,MM Ir.Ahmad Alwi Siregar</p> <p><b>Mediator:</b> Erizal, S.Ag., Mediator</p> <p><b>Panitera Pengganti :</b> Miftahul Muizz, MPd.,Mediator</p>	<b>Putusan Sela</b>
2.	002/II/KIProv-LPG-PS/2021 17 Februari 2021	Pemantau Keuangan Negara Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi.	Kepala Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran tahun 2018 dan Tahun 2019</li> <li>2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2018 dan tahun 2019 disertai dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Catatan atas laporan keuangan.</li> <li>b. Laporan realisasi kegiatan; dan</li> <li>c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Ketua :</b> Ir.Ahmad Alwi Siregar</p> <p><b>Anggota :</b> Muhammad Fuad,S.Sos, Mediator Erizal, S.Ag, Mediator</p>	<b>Putusan Sela</b>

				<p>yang masuk ke Desa. Tahun anggaran 2018 dan Tahun 2019</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Daftar Invebtaris Asset asset Desa</li> <li>4. LPJ BUMDes dan Usaha-usaha desa lainnya</li> <li>5. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT dana Desa APBN Tahun 2020 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) <p>DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana kegiatan dan Anggaran Desa</li> <li>2) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan Rencana Anggaran Biaya</li> </ol> </li> <li>b. Daftar Penerima Bantuan</li> <li>c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</li> </ol> </li> <li>6. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar sumber anggaran dan Jumlah anggaran</li> <li>b. Rencana Kegiatan</li> <li>c. Rencana Anggaran Biaya</li> <li>d. Daftar Penerima bantuan</li> <li>e. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Mediator:</b> Syamsurrizal,SH.,MM</p> <p><b>Panitera Pengganti :</b> Feby Yustikasari,SH.,MH., Mediator</p>	
3	003/II/KIProv-LPG-PS/2021 17 Februari 2021	Pemantau Keuangan Negara Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi.	Kepala Desa Kota Baru Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes Tahun Anggaran tahun 2018 dan Tahun 2019</li> <li>2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Tahun Anggaran 2018 dan tahun 2019 disertai dengan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Catatan atas laporan keuangan.</li> <li>b. Laporan realisasi kegiatan; dan</li> <li>c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Tahun anggaran 2018 dan Tahun 2019</li> </ol> </li> <li>3. Daftar Invebtaris Asset asset Desa</li> <li>4. LPJ BUMDes dan Usaha-usaha desa lainnya</li> <li>5. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT dana Desa APBN Tahun 2020 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) <p>DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana kegiatan dan Anggaran Desa</li> <li>2) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan Rencana Anggaran Biaya</li> </ol> </li> <li>b. Daftar Penerima Bantuan</li> <li>c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</li> </ol> </li> <li>6. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus</li> </ol>	<p><b>Ketua :</b> Syamsurrizal,SH.,MM</p> <p><b>Anggota :</b> Dery Hendryan, S.IP.,SH.,MH.,Mediator Erizal,S.Ag, Mediator</p> <p><b>Mediator:</b> Erizal, S.Ag, Mediator</p> <p><b>Panitera Pengganti :</b> Basuki, SH.,Mediator</p>	<b>Putusan Sela</b>

				<p>Corona Covid 19 yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Daftar sumber anggaran dan Jumlah anggaran</li> <li>Rencana Kegiatan</li> <li>Rencana Anggaran Biaya</li> <li>Daftar Penerima bantuan</li> <li>Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</li> </ol>		
4.	<p><b>004/III/KIProv-LPG-PS-A/2021</b></p> <p>08 Maret 2021</p>	<p><b>Sdr. Hidayatullah, AK</b></p> <p>Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan</p>	<p><b>Kepala Desa Tanjung Baru Kecamatan Merbau Mataram Kabupaten Lampung Selatan</b></p>	<p>1. Laporan keuangan pemerintah desa meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan Keuangan Pemerintahan Desa meliputi : <ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020 semester I.</li> <li>Laporan Realisasi Kegiatan Tahun 2018, Tahun 2019 dan Tahun 2020</li> <li>Kegiatan Desa Tahun 2020 yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan.</li> </ol> </li> <li>Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.</li> <li>Program Bantuan Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota maupun pihak ketiga.</li> <li>Daftar Inventaris aset desa</li> <li>Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 berupa : <ol style="list-style-type: none"> <li>Kuota program PTSL dan Jumlah masyarakat yang mengikuti program PTSL</li> <li>Biaya administrasi program PTSL yang dibebankan kepada setiap warga.</li> <li>Jumlah anggaran</li> <li>Daftar Penerima Bantuan</li> <li>Laporan Pertanggung Jawaban (LPI)</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Ketua :</b> Erizal,S.Ag. Mediator</p> <p><b>Anggota :</b> Ir.Ahmad Alwi Siregar Syamsurrizal,SH,MM</p> <p><b>Mediator:</b> Syamsurrizal,SH,MM</p> <p><b>Panitera Pengganti :</b> Ria Fatimah,S.P.d, Mediator</p>	<p><b>Putusan Akhir</b></p>
5.	<p><b>005/V/KIProv-LPG-PS/2021</b></p> <p>07 Mei 2021</p>	<p><b>Darma Wangsa</b></p>	<p><b>Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran</b></p>	<p>Status SHM No. 542, diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Untuk melihat warkah atau dasar penerbitan SHM No. 542 yang dimaksud;</li> <li>Surat ukur dan Peta Bidang Objek tanahnya ;</li> <li>KTP an. ELYTA dan KTP an. Sutoyo;</li> <li>Untuk meminta Photocopy SHM No. 542 tersebut</li> <li>Dan meminta Surat Keterangan Status SHM NO. 542 tersebut terdaftar atau tidak di Kantor Pertanahan Pesawaran .</li> </ol>	<p><b>Ketua :</b> Syamsurrizal,SH.,MM</p> <p><b>Anggota :</b> Muhammad Fuad,S.Sos Mediator Ir.Ahmad Alwi Siregar</p>	<p><b>Putusan Mediasi</b></p>

					<p><b>Mediator:</b> Erizal, S.Ag., Mediator</p> <p><b>Panitera Pengganti :</b> Miftahul Muizz,M.Pd., Mediator</p>	
6	<p>006/VIII/KIProv -LPG-PS/2021</p> <p>25 Juni 2021</p>	Riksan Aripin	Direktorat Jendral Pajak Bengkulu dan Lampung	Surat Keputusan Laporan Pemeriksaan Bukper PT Domus Jaya 2013	<p><b>Ketua :</b> Dery Hendryan, S.IP.,SH.,MH.,Mediator</p> <p><b>Anggota :</b> Muhammad Fuad,S.Sos, Mediator Syamsurrizal, SH.,MM</p> <p><b>Mediator:</b> Erizal, S.Ag., Mediator</p> <p><b>Panitera Pengganti :</b> Basuki, SH., Mediator</p>	Putusan akhir
7	<p>007/VIII/KIProv -LPG-PS/2021</p> <p>03 Agustus 2021</p>	Pemantau Keuangan Negara	Desa Sumber Tani Kecamatan Abung Pekurun, Lampung Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Desa APBDes dan Perubahan APBDes Tahun 2018. Tahun 2019 dan 2020</li> <li>2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Catatan atas laporan keuangan.</li> <li>b. Laporan realisasi kegiatan; dan</li> <li>c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Tahun anggaran 2018 dan Tahun 2019</li> </ol> </li> <li>3. Daftar Invebtaris Asset asset Desa</li> <li>4. LPJ BUMDes dan Usaha-usaha desa lainnya</li> <li>5. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT dana Desa APBN Tahun 2020 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana kegiatan dan Anggaran Desa</li> <li>2) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan Rencana Anggaran Biaya</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Ketua :</b> Erizal, S.Ag, Mediator</p> <p><b>Anggota :</b> Syamsurrizal, SH.,MM Muhammad fuad, S.Sos, Mediator</p> <p><b>Mediator:</b> Ir.Ahmad Alwi Siregar</p> <p><b>Panitera Pengganti :</b> Basuki, SH., Mediator</p>	Putusan Akhir

				<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Daftar Penerima Bantuan</li> <li>c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</li> </ul> <p>6. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar sumber anggaran dan Jumlah anggaran</li> <li>b. Rencana Kegiatan</li> <li>c. Rencana Anggaran Biaya</li> <li>d. Daftar Penerima bantuan</li> <li>e. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</li> </ul>		
8	008/VIII/KIProv-LPG-PS/2021  03 Agustus 2021	Pemantau Keuangan Negara	Desa Muara Dua Kecamatan Abung Tinggi, Lampung Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Desa APBDes dan Perubahan APBDes Tahun 2018. Tahun 2019 dan 2020</li> <li>2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Catatan atas laporan keuangan.</li> <li>b. Laporan realisasi kegiatan; dan</li> <li>c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Tahun anggaran 2018 dan Tahun 2019</li> </ul> </li> <li>3. Daftar Invebtaris Asset asset Desa</li> <li>4. LPJ BUMDes dan Usaha-usaha desa lainnya</li> <li>5. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT dana Desa APBN Tahun 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) <ul style="list-style-type: none"> <li>DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana kegiatan dan Anggaran Desa</li> <li>2) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan Rencana Anggaran Biaya</li> </ol> </li> <li>b. Daftar Penerima Bantuan</li> <li>c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>6. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar sumber anggaran dan Jumlah anggaran</li> <li>b. Rencana Kegiatan</li> <li>c. Rencana Anggaran Biaya</li> <li>d. Daftar Penerima bantuan</li> <li>e. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>Ketua :</b> Syamsurrizal, SH.,MM</p> <p><b>Anggota :</b> Muhammad fuad, S.Sos, Mediator Erizal, S.Ag, Mediator</p> <p><b>Mediator:</b> Ir.Ahmad Alwi Siregar</p> <p><b>Panitera Pengganti :</b> Fitria Sari,S.Pd., Mediator</p>	Putusan Akhir
9	009/VIII/KIProv-LPG-PS/2021	JNI Pesawaran	Dinas Pendapatan Daerah Kab.Pesawaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadinya Piutang PBB P2 per tanggal 30 Desember 2020</li> <li>2. Kualitas Piutang : Macet ; Diragukan ; Kurang Lacar</li> </ol>	<p><b>Ketua :</b> Erizal, S.Ag, Mediator</p>	Putusan Sela

	26 Juli 2021			3. Penyelesaian Piutang PBB	<p><b>Anggota :</b> Syamsurrizal, SH.,MM Ir.Ahmad Alwi Siregar</p> <p><b>Mediator:</b> Muhammad Fuad, S.Sos.,Mediator</p> <p><b>Panitera Pengganti :</b> Yuli Kurniawati, S.Pd.,Mediator</p>	
10	010/VIII/KIProv -LPG-PS/2021  26 Juli 2021	JNI Pesawaran	Dinas Inspektorat Kab.Pesawaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) Dana Desa (DD) Desa Pasar Baru Kedondong, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020.</li> <li>Dokumen pendukung kegiatan Dana Desa Pasar Baru, Kecamatan Kedondong Tahun Anggaran 2020.</li> </ol>	<p><b>Ketua :</b> Ir. Ahmad Alwi Siregar</p> <p><b>Anggota :</b> Erizal, S.Ag, Mediator Muhammad Fuad, S.Sos, Mediator</p> <p><b>Mediator:</b> Syamsurrizal, SH.,MM</p> <p><b>Panitera Pengganti :</b> Ria Fatimah,S.Pd</p>	<b>Putusan Akhir</b>
11	011/VIII/KIProv -LPG-PS/2021  26 Juli 2021	JNI Pesawaran	Dinas Sosial Kab.Pesawaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan realisasinya Tahun Anggaran 2020 atas Kegiatan Belanja Tak terduga/Belanja Covid 19 Tahun 2020</li> <li>Kontrak kerjasama dan nilainya antara Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Rekanan Pelaksana Kegiatan Belanja Covid 19 Tahun 2020</li> <li>Foto-foto dan dokumen penunjang dalam Kegiatan Belanja covid 19 Tahun 2020</li> </ol>	<p><b>Ketua :</b> Muhammad fuad, S.Sos, Mediator</p> <p><b>Anggota :</b> Syamsurrizal, SH.,MM Ir.Ahmad Alwi Siregar</p> <p><b>Mediator:</b> Erizal, S.Ag, Mediator</p> <p><b>Panitera Pengganti :</b> Miftahul</p>	<b>Putusan Sela</b>

					Muizz.,M.Pd.,Mediator	
12	012/VIII/KIProv -LPG-PS/2021  19 Agustus 2021	A.Syahnuri	Kabag Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat	Penjelasan tentang Dasar hukum dari kabag hukum tulang bawang barat tentang pengelolaan parkir yang tidak sesuai dengan perda Kabupaten Tubabar No. 1 Tahun 2018 tentang perubahan perda No.4 2012	<b>Ketua :</b> Deri Hendryan, S.IP.,SH.,MH.,Mediator  <b>Anggota :</b> Muhammad Fuad.,S.Sos, Mediator Ir.Ahmad Alwi Siregar  <b>Mediator:</b> Syamsurrizal, SH.,MM  <b>Panitera Pengganti :</b> Feby Yustikasari.,SH.,MH.	<b>Putusan Akhir</b>
13	013/VIII/KIProv -LPG-PS/2021  09 September 2021	Pemantau Keuangan Negara	Desa Sukasari Kec. Tanjung Raja Lampung Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Desa APBDes dan Perubahan APBDes Tahun 2018. Tahun 2019 dan 2020</li> <li>2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Catatan atas laporan keuangan.</li> <li>b. Laporan realisasi kegiatan; dan</li> <li>c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Tahun anggaran 2018 dan Tahun 2019</li> </ol> </li> <li>3. Daftar Invebtaris Asset asset Desa</li> <li>4. LPJ BUMDes dan Usaha-usaha desa lainnya</li> <li>5. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT dana Desa APBN Tahun 2020 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) <ul style="list-style-type: none"> <li>DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana kegiatan dan Anggaran Desa</li> <li>2) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan Rencana Anggaran Biaya</li> </ol> </li> <li>b. Daftar Penerima Bantuan</li> <li>c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</li> </ul></li></ol> </li> <li>6. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar sumber anggaran dan Jumlah anggaran</li> <li>b. Rencana Kegiatan</li> </ol> </li> </ol>	<b>Ketua :</b> Muhammad Fuad.,S.Sos, Mediator  <b>Anggota :</b> Ir.Ahmad Alwi Siregar Erizal, S.Ag, Mediator  <b>Mediator:</b> Syamsurrizal, SH.,MM  <b>Panitera Pengganti :</b> Alva Reszha Js, S.Kom	<b>Putusan Akhir</b>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Rencana Anggaran Biaya</li> <li>d. Daftar Penerima bantuan</li> <li>e. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</li> </ul>		
14	014/VIII/KIProv-LPG-PS/2021  09 September 2021	Pemantau Keuangan Negara	Desa Kemala Raja Kec.Tanjung Raja Lampung Utara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Desa APBDes dan Perubahan APBDes Tahun 2018. Tahun 2019 dan 2020</li> <li>2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Catatan atas laporan keuangan.</li> <li>b. Laporan realisasi kegiatan; dan</li> <li>c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Tahun anggaran 2018 dan Tahun 2019</li> </ul> </li> <li>3. Daftar Invebtaris Asset asset Desa</li> <li>4. LPJ BUMDes dan Usaha-usaha desa lainnya</li> <li>5. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT dana Desa APBN Tahun 2020 <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana kegiatan dan Anggaran Desa</li> <li>2) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan Rencana Anggaran Biaya</li> </ol> </li> <li>b. Daftar Penerima Bantuan</li> <li>c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</li> </ul> </li> <li>6. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya. <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar sumber anggaran dan Jumlah anggaran</li> <li>b. Rencana Kegiatan</li> <li>c. Rencana Anggaran Biaya</li> <li>d. Daftar Penerima bantuan</li> <li>e. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</li> </ul> </li> </ol>	<p><b>Ketua :</b> Syamsurrizal, SH.,MM</p> <p><b>Anggota :</b> Muhammad Fuad.,S.Sos, Mediator Ir. Ahmad Alwi Siregar</p> <p><b>Mediator:</b> Erizal, S.Ag, Mediator</p> <p><b>Panitera Pengganti :</b> Miftahul Muizz.,M.Pd.,Mediator</p>	Putusan Akhir
15	015/VIII/KIProv-LPG-PS/2021  12 Oktober 2021	Surya Andalas/Andi Priyadi	Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah Bengkulu dan Lampung	Salinan Faktur Pajak Milik PT. Nian Jaya Abadi yang telah disita melalui putusan pengadilan No. 127/Pid.B/2011/PN.TK	<p><b>Ketua :</b> Syamsurrizal, SH.,MM</p> <p><b>Anggota :</b> Erizal, S.Ag, Mediator Muhammad Fuad.,S.Sos Mediator</p> <p><b>Mediator:</b> Ir.Ahmad Alwi Siregar</p>	Putusan Sela

					<b>Panitera Pengganti :</b> Basuki,SH.,Mediator	
16	016/XII/KIProv- LPG-PS/2021  27 Desember 2021	Pemantau Keuangan Negara	Desa Bumi Mulya Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Desa APBDes dan Perubahan APBDes Tahun 2018. Tahun 2019 dan 2020</li> <li>2. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Catatan atas laporan keuangan.</li> <li>b. Laporan realisasi kegiatan; dan</li> <li>c. Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa. Tahun anggaran 2018 dan Tahun 2019</li> </ol> </li> <li>3. Daftar Invebtaris Asset asset Desa</li> <li>4. LPJ BUMDes dan Usaha-usaha desa lainnya</li> <li>5. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yaitu Dana BLT dana Desa APBN Tahun 2020 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Pelaksanaan anggaran (DPA) <p>DPA sebagaimana dimaksud terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rencana kegiatan dan Anggaran Desa</li> <li>2) Rencana Kerja Kegiatan Desa; dan Rencana Anggaran Biaya</li> </ol> </li> <li>b. Daftar Penerima Bantuan</li> <li>c. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</li> </ol> </li> <li>6. Laporan Penggunaan Dana Bantuan Penanggulangan dan Pencegahan Virus Corona Covid 19 yang bersumber dari APBD dan sumber lainnya. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Daftar sumber anggaran dan Jumlah anggaran</li> <li>b. Rencana Kegiatan</li> <li>c. Rencana Anggaran Biaya</li> <li>d. Daftar Penerima bantuan</li> <li>e. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)</li> </ol> </li> </ol>	<b>Ketua :</b> Syamsurrizal, SH.,MM  <b>Anggota :</b> Erizal, S.Ag.,Mediator Muhammad Fuad.,S.Sos Mediator  <b>Mediator:</b> Ir.Ahmad Alwi Siregar  <b>Panitera Pengganti :</b> Pebi Yustikasari, SH.,MH.,Mediator	<b>Putusan Mediasi</b>

### *Lampiran 3*

#### **Daftar Kegiatan Komisi Informasi Tahun 2021**

1. Pada hari Senin, 5 Juli 2021 aktifitas di Kantor Komisi Informasi sementara tutup s/d 12 Juli 2021 karena ada staf yang terkonfirmasi Covid-19 dan kantor dilakukan penyemprotan pada hari Senin, 5 Juli 2021 oleh tim Satgas Covid-19 Kota Bandar Lampung.  
Pada tanggal 7 Juli 2021 Surat Pemberitahuan petugas aktifitas di kantor disampaikan ke Kadis Kominfotik Provinsi Lampung.
2. Berdasarkan Intruksi Mendagri NO.17/2021 tanggal 09 Juli 2021, Intruksi Gubernur NO.07/2021 tanggal 09 Juli 2021, Intruksi Walikota Bandar Lampung No.04/2021 tanggal 12 Juli 2021 Komisi Informasi melaksanakan kebijakan aktifitas perkantoran dengan WFH 100% dimana untuk pelayanan internal di tugaskan personil Komisi Informasi jabatan sehubungan pelayanan informasi sesuai bidangnya.  
Work From Home (WFH) dilaksanakan sejak tanggal 12 Juli s/d 20 Juli 2021.
3. Pada hari Kamis, 12 Juli 2021 pukul 09.00 WIB PPID Komisi Informasi dari Pemantau Keuangan Negara (PKN) yang dibawa oleh Petugas PKN yaitu M.Yupri.
4. Pada Hari Senin, 19 Juli 2021 Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung (Ir.Ahmad Alwi Siregar) mengikuti doa dari rumah bersama seluruh umat beragama secara virtual yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Lampung pada pukul 10.00 WIB pada pelaksanaannya, doa dari perwakilan agama secara berturut turut dari agama Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katholik, dan Konghucu. Acara dibuka oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.
5. Berdasarkan Inmendagri No.23/2021 tanggal 20 Juli 2021 Pemerintah Provinsi Lampung melakukan PPKM level 4 khusus Kota Bandar Lampung mengawali pada kebijakan di Kantor Komisi Informasi kembali menerapkan WFH 100% dari tanggal 21 Juli s/d 25 Juli 2021 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021 (Inmedagri No 25/2021).
6. Sesuai Permintaan BPS Provinsi Lampung kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung pada hari Rabu, 28 Juli 2021 tentang Survey Kebutuhan Data (SKD) 2021 kami dengan lengkap pertanyaan-pertanyaan pada yang dikirim oleh BPS. Berdasarkan uji akses yang pernah dilakukan Komisi Informasi saat melengkapi data untuk keperluan survey IKIP.
7. Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 10/G/KI/2021/PTUN-BL tanggal 29 Juli 2021 yang menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 001/II/KIPROV-LPG-PS-A/2021 tanggal 1 April 2021 atas banding Putusan Komisi Informasi Lampung tentang Sengketa Informasi Pemantau Keuangan Negara (PKN) dengan kesepakatan Desa Negeri Agung Kabupaten Way Kanan.

8. Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL tanggal 29 Juli 2021 berisikan menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 7 April 2021 atas banding Pemantau Keuangan Negara (PKN) terdapat Keputusan Komisi Informasi Lampung tentang Sengketa Informasi PKN dengan kepala Desa Sunsang Kec. Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.
11. Berdasarkan Inmedagri No.28/2021 tanggal 2 Agustus 2021 Pemda Provinsi melakukan kebijakan PPKM Level 4 di Bandar Lampung mulai dari tanggal 03 Agustus s/d 9 Agustus 2021 maka Kantor Komisi Informasi kembali menerapkan WFH 100%.
12. Pada Hari Selasa, 03 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB Wakil Ketua Komisi Informasi Lampung Erizal S.Ag. melalui aplikasi *Zoom Meeting* mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung terhadap KUPA dan PPAAS perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
13. Pada hari Selasa, 03 Agustus 2020 pukul 15.20 Wakil Ketua Komisi Informasi Mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka penyampaian KUA dan PPAS dan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 melalui Aplikasi aplikasi *Zoom Meeting*.
14. Pada hari Jum'at, 06 Agustus pukul 14.00 Wakil Ketua Komisi Informasi Lampung Erizal,S.Ag. mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung dalam rangka laporan Badan Anggaran DPRD Provinsi Lampung terhadap KUPA dan PPAS perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021. Rapat Paripurna diikuti melalui aplikasi *Zoom Meeting*.
15. Berdasarkan Inmedagri No.31/2021 tanggal 9 Agustus 2021, PPKM level 4 untuk Wilayah Sumatera khususnya Provinsi Lampung di perpanjang dari tanggal 10 Agustus s/d 23 Agustus 2021. Kantor Komisi Informasi Lampung memberitahukan WFH 100% dari tanggal 10 Agustus s/d 14 Agustus 2021. Sedangkan dari tanggal 16 Agustus 2021 s/d Agustus 2021 memberitahukan WFO 25% s/d WFH 75%.
16. Pada hari Senin, 09 Agustus 2021 pukul 14.00 WIB Wakil Ketua Komisi Informasi Lampung Erizal, S.Ag. mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung Pembicaraan Tingkat 1 Penyampaian RAPERDA perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 Rapat Paripurna diikuti Melalui aplikasi Teleconference Zoom.
17. Pada hari Kamis, 12 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB Wakil Ketua Komisi Informasi Lampung Erizal,S.Ag. Mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung melalui aplikasi Teleconference Zoom tentang pembicaraan tingkat 1 dari Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Terhadap RAPERDA perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

18. Pada hari Kamis, 12 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB Wakil Ketua Komisi Informasi Lampung Erisal, S.Ag. mengikuti webinar “Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik PPID KPU Menghadapi Pemilu Dan Pemilihan Tahun 2024” yang diselenggarakan oleh KPU-RI. Bertindak sebagai narasumber adalah: Gede Narayana (Ketua KI Pusat), I Dewa Kade Wiarsta Raka Sandi (Anggota KPU-KI) dan Eberta Kawima (Dep Bidang Dukung dan Teknis KPU-RI). Acara dibuka oleh Ilham Saputra (Ketua KPU-RI).
19. Pada hari Jum’at, 13 Agustus 2021 Pukul 10.00 WIB Wakil Ketua Komisi Informasi Lampung Erizal, S.Ag. mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung melalui Aplikasi Teleconference Zoom tentang jawaban Gubernur Lampung terhadap penandatanganan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung Terkait RAPERDA Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
20. Pada hari Senin, 16 Agustus 2021 pukul 08.00 WIB salah satu Asisten Tenaga Ahli yaitu Ria Fatimah mengikuti Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Lampung dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke 76 Tahun 2021 dengan acara mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Acara ini di ikuti melalui aplikasi Teleconference Zoom.  
Point-point pidato Presiden Republik Indonesia berkisar tentang :
  - a) Tantangan yang berhasil dilalui dalam sejarah bangsa
  - b) Keberhasilan bangsa Indonesia menghadapi berbagai krisis
  - c) Pandemi Covid-19 memacu perubahan dan mengembangkan cara-cara meninggalkan kebiasaan lama,diperlukan inovasi dalam segala bidang
  - d) Dalam kondisi yang dihadapi, perhatian besar terhadap agenda-agenda besar bangsa tidak berkurang sedikitpun
21. Pada hari Senin,16 Agustus 2021 pukul 10.00 s/d 12.30 WIB Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung mengikuti FGD penganggaran Komisi Informasi Daerah melalui aplikasi Zoom. FGD juga diikuti oleh Sekretaris Komisi Informasi dan pelaksana program di Sekretariat Komisi Informasi Daerah ( dalam hal ini Komisi Informasi Provinsi Lampung diwakili oleh Irsan Murhan selaku Kabid Pelayanan Informasi dan Juwita Margaraya selaku Kord. Pelaksana Satuan Administrasi) sebagai narasumber :
  - a) Dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu
  - b) Dari Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri
  - c) Dari Setjen Kominfo RI
  - d) Dari Komisi Informasi Pusat, Bapak A. Kuswardono
22. Sesuai dengan Surat Sekretaris Ditjen Pembangunan Desa pada tanggal 23 Agustus 2021 kepada 10 Kepala Dinas PMD Provinsi Lampung tentang pemberitahuan pendalaman lapangan (visitasi) kegiatan apresiasi Keterbukaan Informasi Publik di Desa dimana Provinsi Lampung tidak termasuk dalam 10 Provinsi tersebut. Dengan demikian, untuk Desa Tegalyoso Kecamatan Purbolinggo Kab. Lampung Timur tidak berhasil mengikuti tahapan lomba berikutnya.

23. Pada hari, 23 Agustus Pukul 14.30 WIB, Komisioner Komisi Informasi Lampung Muhammad Fuad, S.Sos. Mengikuti rapat Paripurna DPRD Lampung melalui aplikasi Teleconference Zoom tentang Laporan Badan Anggaran DPRD Propinsi Lampung Terhadap RAPERDA Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, Pembacaan Keputusan Pusat DPRD dan Penandatanganan RAPERDA Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.
24. Pada hari Rabu, 25 Agustus 2021 melalui media Radar Lampung.co.id, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung Dery Hendryan, S.I.P.,S.H.,M.H., Med menulis opini dengan judul “ Keterbukaan Merdeka dari Pandemi “.
- Pada opini tersebut dikemukakan bahwa ada cara untuk merdeka dari Pandemi Covid yang harus dilakukan Pemerintah bersama-sama masyarakat sipil, yaitu :  
Pembatasan sosial (1), Peningkatan testing dan tracing (2) ; Protokol kesehatan 4M (3) dan gerakan percepat vaksinasi (4).
25. Pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 pukul 10.00 s/d 12.00 WIB. Komisioner Komisi Informasi Lampung tentang :
1. Pembentukan Majelis Komisioner dari 7 Permohonan sengketa Informasi (terlampir)
  2. Permohonan Informasi PKN ke PPID Komisi Informasi Lampung.
  3. Hal-hal Mengenai Protokol kesehatan dalam Pelaksanaan sidang-sidang sengketa Informasi di Komisi Informasi Lampung.
27. Pada hari Senin, 30 Agustus 2021 Syamsurrizal, S.H.,M.M. melalui aplikasi Teleconference Zoom mengikuti rapat Paripurna DPRD Propinsi Lampung Tentang Pembicaraan TKI dalam Rangka 10 RAPERDA usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung dan pembicaraan TKI dalam rangka Penyampaian terhadap 8( delapan) RAPERDA Prakarsa Pemerintah Provinsi Lampung.
28. Pada hari Selasa, 31 Agustus 2021, Asisten Tenaga ahli Komisi Informasi Lampung, Ria Fatimah S.Pd. melalui aplikasi Teleconference Zoom Mengikuti Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tentang Pembicaraan Komisi Informasi I dalam rangka pendapat kepala daerah terhadap 10 RAPERDA usul DPRD Provinsi Lampung dan pemandangan umum dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap 8 RAPERDA Prakarsa Provinsi Lampung.
29. Pada hari Senin, 3 September 2021 pukul 13.30 WIB di ruang sidang Komisi Informasi dilaksanakan rapat majelis prasidang sengketa Informasi antara Riksan Arfin terhadap Kanwil DJP Bengkulu – Lampung dan A. Syahnuri terhadap Kabag Hukum Pemkab. Tulang Bawang Barat yang dihadiri oleh Komisioner Dery Hendryan, S.I.P., S.H., M.H., Med, Muhammad Fuad, S.Sos., Ir Alwi Siregar beserta Asisten Tenaga Ahli : Basuki S.H., dan Feby Yustika Sari, S.H., M.H.
30. Pada hari Senin, 6 September 2021 pukul 09.00 WIB Komisi Informasi Provinsi Lampung (Ir. Alwi Siregar dan Syamsurrizal, S.H.,M.M) mengikuti Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik khususnya penyandang disabilitas yang dilaksanakan Komisi Informasi Pusat secara virtual bertidak selaku narasumber :

1. Wafa Putra Umma ( Komisioner Bid.ASE ) Komisi Informasi Pusat.
  2. Drs. Benni Irwan, M.S., ( Kepala Pusat Penerangan Kementerian dalam negeri )
  3. Anjas Promo ( Penerima YSEALI 2019 USA Government ).
31. Pada hari Senin, 06 September 2021 dilaksanakan rapat prasidang majelis Komisioner Sengketa Informasi Jurnal Nasional Indonesia (JNI) dan Inspektorat Kabupaten Pesawaran. Dihadiri oleh Komisioner Ir. Alwi Siregar , Erizal, S.Ag , Muhammad Fuad, S.Sos.dan Ria Fatimah, S.Pd selaku Panitera Pengganti.
  32. Pada hari Selasa, 7 September 2021 pukul 12.30 WIB dilaksanakan rapat Komisioner tentang hal-hal internal yaitu :
    - Pembagian tugas para Asisten Tenaga Ahli dalam menyusun laporan Tahunan 2021
    - Peraturan piket dalam jam kerja kantor
    - Kehadiran di pertemuan Nasional IKIP tanggal 13 s/d 15 September 2021 : tidak ada yang hadir, tetapi mengikuti acara secara daring
    - Menetapkan nara sumber untuk FGD Pelaksanaan UU NO 14/2008 di kabupaten Lampung Tengah ; yaitu :
      - . Dery Hendryan, S.I.P.,S.H.,M.H.Med.
      - . Muhammad Fuad S.Sos.
  33. Pada hari Jum'at, 10 September 2021 pukul 14.00 WIB Ketua Komisi Informasi Lampung, Ketua KPID Lampung bertemu dengan Kadis Kominfotik Provinsi Lampung di ruang Kadis Kominfotik dengan agenda pembicaraan mengenai :
    - Dukungan, informasi kegiatan mendukung Indeks Inovasi Daerah
    - Penyusunan SSH untuk mendukung anggaran Penyelesaian Sengketa Tahun 2021
    - Kelengkapan sarana dan prasarana
  34. Pada hari Rabu, 15 September 2021 pukul 13.30 WIB dilaksanakan rapat persiapan FGD dalam rangka Hari Hakuntuk Tahu Sedunia tahun 2021 antara lain :
    - Penetapan waktu pelaksanaan : pada tanggal 28 September dan 5 Oktober 2021
    - Peserta masing-masing 30 orang
    - Unsur Peserta adalah Organisasi mahasiswa internal kampus dan organisasi mahasiswa eksternal kampus, jurnalis, profesi, LSM dan LBH
    - Narasumber dari Akademi/praktisi yaitu Dr. Budiyo, S.H, M.H. atau Dr. Dedy Hermawan S.Sos,M.si.
    - Rapat Pelaksanaan : Hotel Springhill, Teluk betung.
  35. Pada hari Rabu, 15 September 2021 pukul 19.00 WIB Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung mengikuti acara forum IKIP 2021 melalui media Zoom Meeting  
Acara dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Pusat : Gede Narayana.
  36. Pada hari Kamis, 16 September pada kegiatan yang sama melalui media zoom meeting dilaksanakan pembahasan issue IKIP dengan tematik : Demokrasi,

Perempuan dan ekonomi. Paparan Hasil IKIP Nasional dilaksanakan tanggal 16 September 2021 dengan hasil IKIP Nasional, Skore : 71.37 ( Katogori sedang ) dengan rincian sebagai berikut :

- Nilai IKIP Tinggi diraih oleh Bali, Kalbar dan Aceh (kategori Baik)
- Nilai IKIP Terendah diraih oleh : Papua barat dan Sulawesi Tengah (kategori buruk).

37. Pada hari Jum'at, 17 September 2021 pukul 14.00 WIB dilaksanakan rapat Majelis Komisioner membahas draft Analisis sengketa Informasi antara Riksan terhadap Kanwil DIP Lampung Bengkulu dan A.Syahnuri terhadap Kabag Hukum Pemkab Tulang Bawang Barat.

38. Pada hari Senin, 20 September 2021 pukul 13.00 WIB dilaksanakan rapat Majelis Komisioner sebelum sidang :

- a. JNI dan Inspektorat Kabupaten Pesawaran
- b. PKN dan Kades Sumber Tani, Kecamatan Abung Pekurun, Kabupaten Lampung Barat.

Juga dilaksanakan rapat Komisioner Pembentukan Majelis Komisioner 2 Sengketa Informasi, yaitu:

- a. PKN dan Kades Suka Sari, Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.
- b. PKN dan Kades Kemala Raja , Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara.

39. Pada hari Kamis, 23 September 2021 pukul 08.30 WIB Erizal S.Ag dan Syamsurrizal,S.H.,M.M. mengikuti webinar sosialisasi IRIO Provinsi Lampung yang diselenggarakan oleh BPS Provinsi Lampung dengan Thema : “Mendorong Sektor Unggulan Dalam Menyukkseskan Lampung Berjaya”.

40. Pada hari Kamis, 23 September 2021 pukul 14.00 WIB dilaksanakan rapat Majelis Komisioner membahas draft Putusan Sela Sengketa Informasi antara A.Syahnuri Terhadap Kabag Hukum Pemkab Tulang Bawang Barat

41. Pada Hari Jum'at, 24 September 2021 Komisioner Komisi Informasi Lampung mengikuti Sosialisasi PERKI SLIP No. 1 tahun 2021 melalui zoom meeting, dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Pusat : Gede Narayana.

Narasumber Pada Sosilisasi ini :

- Hendra J. Kede ( Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat)
- M.Syahya ( Komisioner Komisi Informasi Pusat)
- Wafa Patrianma (Komisioner Komisi Informasi Pusat)
- Imam Nasef (Komisi Informasi Pusat)

42. Pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 09.00 WIB dilaksanakan rapat final kesiapan pelaksanaan FGD Keterbukaan Informasi yang dihadiri oleh seluruh Komisioner Komisi Informasi Lampung dan kordinator admistrasi Komisi Informasi Lampung dengan Hasil :

- Pelaksanaan FGD pada tanggal 28 September 2021 di Hotel SpringHill akan dibuka oleh Kadis Kominfotik Provinsi Lampung selaku Narasumber

- a. Dr. Dedy Intermawan ,S.Sos.,M.Si dengan thema “ Keterbukaan Informasi Publik dan peran Civil Society”.
  - b. Muhammad Fuad S.Sos ( Komisioner Komisi Lampung )dengan judul : Pelaksanaan UU No.14 tahun 2008 tantang Keterbukaan Informasi Publik.
43. Pada hari Senin, 27 September 2021 pukul 14.00 WIB dilaksanakan rapat Majelis Komisioner Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) JNI Pesawaran dan Inspektorat Pesawaran. Membahas draft analisis sengketa kesimpulan : Persidangan PSI antara JNI Pesawaran dan Inspektorat Pesawaran berlanjut ke pokok perkara di sidang ajudikasi.
  44. Pada hari Kamis, 30 September 2021 pukul 10.00 WIB dilaksanakan rapat Majelis Komisioner Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) antara JNI Kabupaten pesawaran dan Dinas Sosial untuk membahas draft Putusan Sela.
  45. Pada hari Kamis, 30 September 2021 pukul 11.00 WIB Komisioner Komisi Informasi Lampung, Erizal S.Ag (Wakil Ketua) mengikuti zoom meeting pelatihan Pembukaan Putusan Ajudikasi yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat Pada Tanggal 29 September s/d 10 Oktober 2021.
  46. Pada hari Jum'at 01 Oktober 2021 pukul 13.30 WIB, Majelis Komisioner Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) antara JNI Pesawaran dan Inspektorat Pesawaran melakukan kajian terhadap sidang pemeriksaan awal sampai sidang pokok perkara; sebagai bahan pengambilan keputusan.
  47. Pada hari Senin, 04 Oktober pukul 14.00 WIB Majelis Komisioner Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) antara JNI Pesawaran melakukan pembahasan hasil sidang pokok perkara sebagai bahan pengambilan keputusan.
  48. Pada hari Kamis, 07 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB Komisi Informasi Lampung diwakili oleh Asisten Tenaga Ahli Komisioner mengikuti webinar Keterbukaan Informasi Publik dengan tema : “Perempuan Merdeka Informasi ,Cukup Informasi dan Anti Hoax” dengan narasumber :
    1. Siti Mukaronmah MAP (PP Fatayat NU )
    2. Dra Lenny Rosalin, MSc, M Tin ( Kementrian PPA)
    3. Wafa Patria Umma ( Komisioner Bid.ASE Komisi Informasi Pusat )
    4. Yessi ( Local Champion Aceh )
  49. Pada hari Kamis, 07 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB Majelis Komisioner Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) JNI Pesawaran dan Inspektorat Pesawaran melakukan pembahasan lanjutan hasil sidang pokok perkara sebagai bahan pengambil keputusan, akhir pada sengketa di atas.
  50. Pada hari Senin, 18 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB diadakan rapat membahas draft keputusan sidang pokok perkara sengketa Informasi antara JNI Kabupaten Pesawaran dan Inspektorat dan Inspektorat Kabupaten Pesawaran dan

Inspektorat Kabupaten Pesawaran ; dimana Sidang Pembacaan Keputusannya akan dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB.

51. Pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 pukul 10.00 WIB diadakan rapat Komisioner Pembahasan bahan masukan terhadap RAPERDA Pelayanan Informasi dan dokumen Publik ( Raperda Inisiatif DPRD kota Bandar Lampung. Dihadiri oleh Alwi Siregar, Muhammad Fuad S.Sos, Syamsurizzal S.H.M.H dan Erizal S.Ag.)
52. Pada hari Selasa, 19 Oktober 2021 pukul 14.00 WIB dilaksanakan rapat Komisioner membahas pembentukan majelis Komisioner PSI antara Surya Andalas.com dengan Kanwil DJP Bengkulu Lampung ; dengan susunan majelis :  
Ketua / Anggota : Syamsurizzal, S.H.M.M  
Anggota : 1. Muhammad Fuad S.Sos  
                  2. Erizal S.Ag  
Mediator : Ir. Ahmad Alwi Siregar  
Panitera Pengganti : Basuki.
53. Pada hari Kamis, 21 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB Ketua Komisi Informasi Ir. Alwi Siregar dan Ketua Divisi Penyelesaian Sengketa Informasi Syamsurizzal, S.H.M.H menghadiri undangan dari DPRD Kota Banda Lampung dalam rangka membahas Raperda tentang Pelayanan Informasi dan dokumen Publik. Rapat didampingi oleh Hanafi Pulung, Hermawan, Gerry.
54. Pada hari Senin, 25 Oktober 2021 pukul 09.00 WIB Komisioner Komisi Informasi Lampung ( Wakil Ketua Erizal S.Ag dan Kordiv. PSI Syamsurizzal, S.H.M.M mengikuti FGD draf Keputusan Komisi Internal Rakornas 2021, berupa pembahas Finalisasi kertas kinerja kebijakan penguatan Anggaran Komisi Informasi). Kegiatan FGD ini dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat melalui aplikasi zoom meeting. FGD ini dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana; dan dipandu oleh Arif Adi Kuswardono ( Komisioner Komisi Informasi Pusat ).
55. Pada hari Selasa, 26 Oktober 2021 pukul 09.00 Komisioner Komisi Informasi Lampung Syamsurizzal.S.H.M.M mengikuti acara Penganugrahan Keterbukaan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat melalui aplikasi zoom meeting.  
Pemerintah Provinsi Lampung memperoleh Kategori “ Menuju Informasi “ dengan nomor urut 5 sedangkan kategori Perguruan Tinggi Negeri Institut Teknologi Sumatera (ITERA) dan Universitas Lampung (UNILA) mengikuti kategori “Menuju Informatif“ masing-masing urutan 2 dan 3.  
Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Komisi Informasi (KI) Pusat Berkolaborasi bersama Pemerintah untuk terus mengawal pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Tanah Air.
56. Pada hari Rabu 3 November 2021 Perkumpulan Jurnalis Nasional Indonesia (PJNI) Kabupaten Pesawaran mendaftarkan keberatan terhadap utusan Komisi Informasi terhadap perkara dengan nomor register : 010/VIII/KIPProv-LPG-PS/2021 yang dibacakan pada tanggal 21 Oktober 2021 keberatan tersebut telah

terdaftar di kepanitaraan pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Pada Tanggal 03 November 2021.

57. Pada hari Jum'at, 05 November 2021 bertempat di Kantor Komisi Informasi Lampung dilaksanakan rapat Komisioner tentang rapat persiapan rencana mengikuti bimtek Mediator bentuk sertifikat di UGM Jogjakarta tanggal 17-20 November 2021.
58. Pada hari Juma'at 12 November 2021 pukul 10.00 WIB di Kantor Komisi Informasi Lampung dilaksanakan rapat pleno Komisioner Komisi Informasi Lampung yang dihadiri oleh semua Komisioner, membahas berbicara hal –hal
  - Penjadwalan Kunjungan ke Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Penguatan PPID di Kabupaten.
  - Penyerapan Anggaran Komisi Informasi
  - Pelaporan Anggaran secara berkala
  - Kegiatan Komisi Informasi Pada APBD Tahun Anggaran 2022
  - PPTK yang diusulkan Tahun Anggaran 2022 bertugas dan berkedudukan di sekretariat Komisi Informasi.
59. Pada hari Senin, 15 November 2021 pukul 10.00 WIB, Asisten Tenaga Ahli Komisi Informasi Lampung ( Feby Yustika, S.H., M.H ) mengikuti rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung pembicaraan Tingkat I penyampaian Raperda APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2022 diikuti secara virtual.
60. Pada hari Selasa, 16 November 2021 pukul 10.00 WIB Asisten Tenaga Ahli Komisi Informasi Lampung ( Yuli Kurniawati, S.Pd ) mengikuti rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung lanjut pembicaraan Tingkat I Fraksi-fraksi DPRD Provinsi terhadap Raperda APBD Provinsi Lampung tahun Anggaran 2022 diikuti secara Virtual.
61. Pada hari Kamis, 17 November 2021 pukul 10.00 WIB Komisioner Komisi Informasi Lampung Syamsurrizal,S.H.M.M., menghadiri undangan KPI Daerah Lampung (Anugrah KPID Award Provinsi Lampung) yang dilaksanakan oleh KPID Provinsi Lampung di Hotel Horison, Jl.Kartini Bandar Lampung. Penghargaan meliputi 14 Kategori.
62. Pada hari senin tanggal 27 Desember 2021 pukul 09.00 WIB Komisioner Komisi Informasi Lampung (Erizal S.Ag dan Sysmsurrizal S.H.M.M) mengikuti Diskusi tentang Optimalisasi Layanan Informasi Publik Untuk Percepatan Vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat secara virtual.

Acara dibuka oleh Ketua Komisi Informasi Pusat Gede Narayana dan yang bertindak Sebagai Keynote Speaker Menko PMKRI Prof.Dr. Muhadjir Effendy,M.A.P. sedangkan yang bertindak sebagai narasumber :

  - a. Gubernur Jawa Tengah H.Ganjar Pranowo, SH,M.I.P
  - b. Deputi II Kantor Staf Presiden
  - c. Komisioner Komisi Informasi Pusat Arif Adi Kuswardono
  - d. Head of Government and Public Sector Google Indonesia Danny Ardianto

63. Pada hari Kamis, 30 Desember 2021 dilaksanakan rapat lengkap staf sekretariat (PNS dan non PNS), Asisten Tenaga Ahli dan Komisioner untuk persiapan kerja Tahun Anggaran. 2022. Beberapa kesimpulan rapat, yaitu :
- a. Perlu direncanakan penyusunan Rencana Perubahan Anggaran 2022
  - b. Diusulkan penambahan personil untuk mendukung tugas tugas komisioner dan sekretariat. Diusulkan sdr Syarifuddin Abas dan Aprinando
  - c. Perlu pengadaan sarana pendukung PPID KI, antara lain : penyiapan ruangan, dukungan administrasi, personil dan keuangan

#### Lampiran 4

### Surat Masuk dan Surat Keluar

#### 1. Surat Masuk selama Tahun 2021 di Komisi Informasi Provinsi Lampung

Surat Masuk Sebanyak = 72 Surat

No	No Surat	Pengirim Surat	Tanggal Surat	Perihal	Keterangan
1	01/Warga Tanjung Baru/SPI/XII/2020	Ismail, dkk Waga/tokoh masyarakat Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram	19 Des 2020 diterima tanggal 05 Jan 2021	Permohonan Informasi Publik penyelenggaraan pemerintahan desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram	
2	02/Warga Tanjung Baru/SPI/I/2021	Ismail, dkk Waga/tokoh masyarakat Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram	18 Jan 2021	Surat Keberatan Permohonan Informasi Publik	
3	006/UND-LPPAN/II/2021	LPPAN (Lembaga Pendidikan & Pelatihan Aparatur Negara)	01 Feb 2021	Undangan Bimbingan Teknis	
4	01/Gugatan/Dana Desa/Negeri Agung/PKN/II/2021	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	15 Feb 2021	Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik	
5	01/Gugatan/Dana Desa/Sunsang/PKN/II/2021	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	15 Feb 2021	Permohonan Gugatan Sengketa Informasi	-

				Publik	
6	01/Gugatan/Dana Desa/Kota Baru/PKN/II/2021	Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara	15 Feb 2021	Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik	
7	022/SK/LBH-BL/II/2021	LBH Bandar Lampung	23 Feb 2021	Somasi & Klarifikasi II (dua)	<i>Tembusan</i>
8	WI-TUN4/243/HK.06/3/2021	Pihak POS	03 Maret 2021	Penyampaian Salinan Laporan Tahunan 2020	
9	03/Warga Tanjung Baru/SPI/III/2021	Warga Desa Tanjung Baru Kec. Merbau Mataram Kab. Lamsel	08 Maret 2021	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
10	WI-TUN4/261/KP.01.1/3/2021	PTUN Bandar Lampung	03 Maret 2021	Informan Ahli Daerah	
11	103/S/XVIII.BLP/03/2021	BPK Perwakilan	12 Maret 2021	Penyampaian Laporan Pengelolaan dan Layanan Informasi	
12	32/KPID-LPG/III/2021	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung	17 Maret 2021	Memeriahkan rangkaian peringatan Harsiarnas 2021	Memasang spanduk di mulai tanggal 26 Maret 2021 s/d 1 April 2021
13	-	Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tulang Bawang	-	Laporan Pengelolaan Informasi Publik Tahun 2020	
14	900/261/V.18/2021	Dinas Perhubungan	31 Maret 2021	Laporan Tahunan PPID Pembantu Tahun 2020	

15	B-357/UN.16/B.2/H.M01/03/2021	UIN Raden Intan Lampung	31 Maret 2021	Laporan Tahunan PPID	
16	-	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	-	Laporan Tahunan PPID BPS Prov. Lampung Tahun 2020	
17	800/296/V.12/2021	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Transmigrasi	31 Maret 2021	Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2020	
18	116/HM.03.1-SD/18/Prov/IV/2021	KPU Lampung	09 April 2021	Permintaan Username Badan Koordinasi Kehumasan	<i>Sudah diterima tanggal 08 Maret 2021</i>
19	555.4/1135/V.14.4/2021	Sekretariat Daerah	07 April 2021	Pemasangan Jaringan Local Area Network (LAN) pada pangkat daerah	<i>Sudah diterima tanggal 14 Maret 2021</i>
20	005/861/III.01/2021	Staf DPRD Prov. Lampung	16 April 2021	Rapat Paripurna DPRD Prov. Lampung	
21	005/891/III.01/2021	Staf DPRD Prov. Lampung	20 April 2021	Rapat Paripurna DPRD Prov. Lampung	
22	W.1/TUN4/1HK.06/4/2021	Pengadilan Tata Usaha Negara	22 April 2021	Permintaan Salinan Resmi Putusan Beserta Seluruh Berkas Perkaranya	

23	-	Kusaeri Suwandi & Partner	06 Mei 2021	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi	<i>BPN Kabupaten Pesawaran</i>
24	WI.TUN4/427/HK.06/05/2021	Pengadilan Tata Usaha Negara	06 Mei 2021	Permintaan Salinan Resmi Putusan Beserta Seluruh Berkas Perkaranya	
25	005/1092/II.01/2021	DPRD Prov.Lampung	18 Mei 2021	Rapat Paripurna DPRD Prov. Lampung	<i>Hari : Rabu, Tanggal : 19 Mei 2021, Pukul : 10.30 WIB, Tempat : Ruang Sidang DPRD Prov. Lampung</i>
26	HP.01/457-18.09/V/2021	BPN Pesawaran	18 Mei 2021	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi	
27	339/KIP/V/2021	Komisi Informasi Pusat RI	21 Mei 2021	Pelatihan pembuatan Putusan Ajudikasi	<i>Hari : Rabu- Jum'at Tanggal : 09-11 Juni 2021</i>
28	890/0979/IV.21/2021	Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat Sekretariat Daerah	20 Mei 2021	Permohonan Narasumber Bimbingan Teknis PPID	<i>Hari : Selasa, tanggal : 08 Juni 2021 Pukul : 07.30-15.30 Tempat : Aula Hotel Sartika</i>
29	028/05.05/K.LA/06/2021	Bawaslu Prov.Lampung	03 Juni 2021	Undangan Apel Pencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	<i>Hari : Senin Tanggal : 07 Juni 2021 Pukul : 09.00 WIB</i>

30	B-025/BPS/18523/06/2021	Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung	04 Juni 2021	Permintaan Data Informasi Publik	
31	005/1349/III.01/2021	DPRD Prov.Lampung	18 Juni 2021	Rapat Paripurna DPRD Prov. Lampung	<i>Hari : Senin Tanggal : 21 Juni 2021 Pukul : 10.00 WIB</i>
32	005/1351/III.01/2021	DPRD Prov.Lampung	18 Juni 2021	Rapat Paripurna DPRD Prov. Lampung	<i>Hari : Selasa Tanggal : 22 Juni 2021 Pukul : 10.00 WIB</i>
33	005/1353/III.01/2021	DPRD Prov.Lampung	18 Juni 2021	Rapat Paripurna DPRD Prov. Lampung	<i>Hari : Rabu Tanggal : 23 Juni 2021 Pukul : 10.00 WIB</i>
34	005/1356/III.01/2021	DPRD Prov.Lampung	18 Juni 2021	Ralat Waktu Rapat Paripurna DPRD Prov. Lampung	<i>Hari : Senin Tanggal : 21 Juni 2021 Pukul : 16.00 WIB</i>
35	005/1370/III.01/2021	DPRD Prov.Lampung	22 Juni 2021	Ralat Waktu Rapat Paripurna DPRD Prov. Lampung	<i>Hari : Rabu Tanggal : 23 Juni 2021 Pukul : 10.00 WIB</i>
36	005/1370/III.01/2021	DPRD Prov.Lampung	22 Juni 2021	Ralat Waktu Rapat Paripurna DPRD Prov. Lampung	<i>Hari : Rabu Tanggal : 23 Juni 2021 Pukul : 10.00 WIB</i>
37	14/G/2021/PTUN.BL	-	25 Juni 2021	Surat Panggilan	
38	Mp.02.02/866-18.71	BPN Provinsi Lampung	19 Juli 2021	Permintaan Klarifikasi dan Informasi Data	<i>Tembusan</i>
39	005/1309/III.01/2021	DPRD	28 Juli 2021	Rapat	<i>Hari : Jum 'at</i>

		Prov.Lampung		Paripurna DPRD Prov. Lampung	<i>Tanggal : 23 Juni 2021 Pukul : 14.00 WIB</i>
40	005/1309/III.01/2021	DPRD Prov.Lampung	28 Juli 2021	Rapat Paripurna DPRD Prov. Lampung	<i>Hari : Selasa Tanggal : 03 Agustus 2021 Pukul : 14.00 WIB</i>
41	-	Sutoyo, MBA	12 Juli 2021	Permintaan Informasi dan Data Sengketa	
42	-	DPRD Prov. Lampung	16 Agustus 2021	Undangan HUT RI	<i>Hari : Senin Tanggal : 16 Agustus 2021 Pukul : 08.00 WIB</i>
43	005/1742/III.01/2021	DPRD Prov. Lampung	20 Agustus 2021	Rapat Paripurna DPRD Prov. Lampung	<i>Hari : Senin Tanggal : 23 Agustus 2021 Pukul : 14.00 WIB</i>
44	03/V/DJ/2021	Riksan Arifin	16 Juni 2021	Permohonan Informasi Antara Riksan Arifin Terhadap Kantor Wilayah Ditjen Pajak Bengkulu – Lampung	
45	02/Gugatan/Desa Muara Dua/PKN/VI/2021	PKN (Pemantau Keuangan Negara)	21 Juni 2021	Permohonan Informasi Antara PKN Terhadap PPID Kepala Desa Muara Dua	
46	02/Gugatan/Desa Sumber	PKN (Pemantau Keuangan	23 Juni 2021	Permohonan Informasi	

	Tani/PKN/VI/2021	Negara)		Antara PKN terhadap PPID Kepala Desa Sumber Tani	
47	-	JNI (Jurnalis Nasional Indonesia)	26 Juli 2021	Permohonan Informasi Antara JNI terhadap Dinas Sosial Kab. Pesawaran	
48	-	JNI (Jurnalis Nasional Indonesia)	26 Juli 2021	Permohonan Informasi Antara JNI terhadap Kepala Dinas Pendapatan Kab. Pesawaran	
49	-	JNI (Jurnalis Nasional Indonesia)	26 Juli 2021	Permohonan Informasi Antara JNI terhadap Inspektorat Kab. Pesawaran	
50	21/SRT-KLR/VIII/2021	A.Syahnuri	19 Agustus 2021	Permohonan Informasi Antara A.Syahnuri terhadap Kabag Hukum Pemda TBB	
51	005/1784/III.01/2021	DPRD Prov. Lampung	27 Agustus 2021	Undangan Rapat Paripurna DPRD Prov. Lampung	<i>Hari : Senin Tanggal : 30 Agustus 2021 Pukul : 10.00 WIB</i>
52	005/1786/III.01/2021	DPRD Prov. Lampung	27 Agustus 2021	Undangan Rapat Paripurna	<i>Hari : Selasa Tanggal : 01 September 2021</i>

				DPRD Lampung	<i>Pukul : 10.00 WIB</i>
53	005/1788/III.01/2021	DPRD Prov. Lampung	27 Agustus 2021	Undangan Rapat Paripurna DPRD Lampung	<i>Hari : Rabu Tanggal : 30 Agustus 2021 Pukul : 10.00 WIB</i>
54	-	PKN (Pemantau Keuangan Negara)	09 September 2021	Permohonan Informasi Antara PKN terhadap Desa Kemala Raja	
55	-	PKN (Pemantau Keuangan Negara)	09 September 2021	Permohonan Informasi Antara PKN terhadap Desa Suka Sari	
56	01/Pemb/PKN/Lampung Timur/IX/2021	PKN (Pemantau Keuangan Negara)	13 September 2021	Pemberitahuan Pembentukan Tim PKN Lampung Timur	<i>Lampiran Surat Tugas</i>
57	900/523/IV/06/2021	Dinas Sosial Pesawaran	16 September 2021	Pemberitahuan	
58	-	Ivin Aidyan Firnandez	16 September 2021	Permohonan Informasi Publik	
59	-	Andi Priyadi	12 Oktober 2021	Permohonan Informasi Publik	
60	005/766/II.001-170/2021	DPRD Prov. Lampung	18 Oktober 2021	Undangan Rapat Paripurna DPRD Lampung	<i>Hari : Kamis Tanggal : 21 Oktober 2021 Pukul : 09.00 WIB</i>
61	B102/18550/KS.100/10/2021	Kepala BPS Provinsi Lampung	05 Oktober 2021	Undangan Webinar SPGS	<i>Hari : Kamis Tanggal : 19 Oktober 2021 Pukul : 08.30-</i>

					12.00 WIB
62	421.3/470.A/V.01/SM AN2/2021	SMA N 2 Bandar Lampung	25 Oktober 2021	Permohonan Menjadi Narasumber	<i>Hari : Jum'at Tanggal : 29 Oktober 2021 Pukul : 09.05-10.05 WI</i>
63	005/2213/III.01/2021	DPRD Prov. Lampung	25 Oktober 2021	Undangan Rapat Paripurna DPRD Lampung	<i>Hari : Senin Tanggal : 25 Oktober 2021 Pukul : 13.00 WIB</i>
64	010/JNI-PWR/X/2021	JNI Pesawaran	29 Oktober 2021	Mohon Klarifikasi	
65	VVI/TUNA/989/HK.06/II/2021	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	03 November 2021	Permintaan Salinan Resmi Putusan beserta seluruh berkas perkaranya	
66	1421/XIII-05?2021	BPJS Kesehatan	05 November 2021	Permohonan Narasumber	<i>Hari : Rabu Tanggal : 10 November 2021 Pukul : 17.00 WIB</i>
67	-	KPID Lampung	09 November 2021	Undangan KPID Awards 2021	<i>Hari : Rabu Tanggal : 10 November 2021 Pukul : 09.00 WIB Tempat : Hotel Horison Lampung</i>
68	005/2322/III.01/2021	DPRD Prov. Lampung	09 November 2021	Undangan Rapat Paripurna DPRD Lampung	<i>Hari : Rabu Tanggal : 10 November 2021 Pukul : 14.00 WIB</i>
69	96/SK/LBH-BL/XI/2021	LBH Bandar Lampung	12 November 2021	Undangan Pelantikan & Serah Terima Jabatan Direktur LBH	<i>Hari : Rabu Tanggal : 17 November 2021 Pukul : 09.00 WIB</i>

				B. Lampung Periode 2021- 2025	<i>Tempat : Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Lampung</i>
70	210/PM.00.01/K/L.A/ II/2021	Bawaslu Kota Bandar Lampung	16 November 2021	Undangan Rakor Evaluasi Pilkada 2020 & Proyeksi PEMILU Serentak Tahun 2021	<i>Hari : Jum'at Tanggal : 19 November 2021 Pukul : 13.00 WIB Tempat : Hotel Novotel Bandar Lampung</i>
71	116/HM.07.1/K.LA/II /2021	Bawaslu Provinsi Lampung	18 November 2021	Permohonan Menjadi Narasumber	<i>Hari : Sabtu Tanggal : 10 November 2021</i>
72	005/894/V/VI.07/202 1	-	18 Desember 2021	Undangan	<i>Hari : Kamis Tanggal : 16 Desember 2021 Pukul : 09.00 WIB Tempat : Aula Bhinneka Tunggal Ika</i>

## 2. Surat Keluar Selama Tahun 2021 di Komisi Informasi Provinsi Lampung

Surat Keluar Sebanyak = 86 Surat

No	Nomor Surat	Tujuan Surat	Tanggal Surat	Perihal	Keterangan
1	01/KI-LPG/I/2021	Bpk. Gubernur Lampung melalui Sekda Provinsi Lampung	22 Januari 2021	Penambahan 1 (satu) petugas pendamping	
2	02/KI-LPG/I/2021	-	22 Januari 2021	Penyampaian Salinan Laporan Tahun 2020	

3	03/KI-LPG/I/2021	Bupati/Walikota Se- Provinsi Lampung	22 Januari 2021	Penyampaian Salinan Laporan Tahun 2020 (Surat Pengantar)	
4	04/KI-LPG/I/2021	Ketua KI Pusat	27 Januari 2021	Usulan Calon Anggota Kelompok Kerja Daerah	<i>-Lampiran Usulan Kelompok Kerja -Lampiran SK Sdr. Khalida -Lampiran SK Wulan Suciska</i>
5	05/KI-LPG/I/2021	Ibu Khalida, S.H., Mediator & Dekan FISIP UNILA	27 Januari 2021	Permohonan Persetujuan	<i>Calon Anggota Kelompok Kerja Daerah</i>
6	06/KI-LPG/II/2021	Biro Hukum Provinsi Lampung	23 Februari 2021	Lampiran SK ASTA	
7	07/SK/I/KI- LPG/2021	-	23 Januari 2021	SK PPID Komisi Informasi	Intern Sekret KI Lampung
8	800/08/KI- LPG/III/2021	Kepala BPS Provinsi Lampung	04 Maret 2021	Permohonan Informan Ahli	
9	800/09/KI- LPG/III/2021	Kepala Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	04 Maret 2021	Permohonan Informan Ahli	
10	800/10/KI- LPG/III/2021	Kepala Bappeda Provinsi Lampung	04 Maret 2021	Permohonan Informan Ahli	
11	800/11/KI- LPG/III/2021	Hendri Sihalolo, SH	04 Maret 2021	Permohonan Informan Ahli	
12	800/12/KI- LPG/III/2021	Eko Rahardjo, S.H., M.H	04 Maret 2021	Permohonan Informan Ahli	
13	800/13/KI- LPG/III/2021	Kurniadi, S.Sos	04 Maret 2021	-Permohonan Informan Ahli - Pelaksanaan Survey IKIP	

14	800/14/KI-LPG/III/2021	Seli Fitriyani, S.H	04 Maret 2021	Permohonan Informan Ahli	
15	800/15/KI-LPG/III/2021	Dr. Amalia	04 Maret 2021	-Permohonan Informan Ahli - Pelaksanaan Survey IKIP	
16	800/16/KI-LPG/III/2021	Ifin Arham	04 Maret 2021	-Permohonan Informan Ahli - Pelaksanaan Survey IKIP	
17	800/17/KI-LPG/III/2021	PT. Telkom	25 Februari 2021	Pencabutan Layanan Wifi	
18	800/18/KI-LPG/III/2021	Seli Fitriyani, S.H	17 Maret 2021	Pelaksanaan Survey IKIP	
19	800/19/KI-LPG/III/2021	Ida Lintah, S.H	17 Maret 2021	Pelaksanaan Survey IKIP	
20	800/20/KI-LPG/III/2021	Belli Pahlupi, S.T., M.T	17 Maret 2021	Pelaksanaan Survey IKIP	
21	800/21/KI-LPG/III/2021	Hendry Sihatoha,S.H	17 Maret 2021	Pelaksanaan Survey IKIP	
22	26/KI-LPG/III/2021	Bupati/Walikota Se- Provinsi Lampung	22 Maret 2021	Penyampaian Salinan Laporan Tahun 2020	
23	27/KI-LPG/III/2021	- Bpk. Heri Andryan - Pimpinan Batik Gabovira	23 Maret 2021	Pelaksanaan Survey IKIP	
24	28/KI-LPG/III/2021	Kadis PMD	26 Maret 2021	Silaturahmi dan Koordinasi Kegiatan/Program	
25	29/KI-LPG/III/2021	KI Pusat	26 Maret 2021	Perubahan Usulan	

				Informasi Ahli Daerah Survey Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Tahun 2021	
26	30/KI-LPG/IV/2021	Kadis Kominfotik Prov. Lampung	01 April 2021	Rapat Persiapan Pelaksanaan Program/ Kegiatan TA 2021	
27	31/KI-LPG/IV/2021	Kepala Bappeda Prov. Lampung	14 April 2021	Permohonan Menjadi Narasumber FGD	<i>Hari : Senin, Tanggal : 19 April 2021 Tempat : Novotel Lampung</i>
28	32/KI-LPG/IV/2021	Kepala PTUN Bandar Lampung	14 April 2021	Permohonan Menjadi Narasumber FGD	
29	33/KI-LPG/IV/2021	Kepala BPS Prov. Lampung	14 April 2021	Permohonan Menjadi Narasumber FGD	
30	34/KI-LPG/IV/2021	Ketua KI Pusat	14 April 2021	Pemberitahuan Rekomendasi Desa Terbaik	
31	700/35/KI-LPG/IV/2021	Panitera PTUN Bandar Lampung	14 April 2021	Penyerahan Salinan Resmi Putusan beserta seluruh berkas perkaranya	<i>Antara PKN Desa Negeri Agung</i>
32	700/36/KI-	Panitera PTUN	20 Mei	Penyerahan	<i>Antara PKN</i>

	LPG/IV/2021	Bandar Lampung	2021	Salinan Resmi Putusan beserta seluruh berkas perkaranya	<i>Desa Sunsang</i>
33	37/KI-LPG/IV/2021	Dewan Pimpinan Wilayah Jurnalis Nasional Indonesia Lampung	24 Mei 2021	Balasan Audiensi	<i>Hari : Selasa, Tanggal : 25 Mei 2021</i>
34	800/38/V.14/KI-LPG/2021	Sekda Pesisir Barat	Juni 2021	Penugasan Menjadi Narasumber	
35	800/39/V.14/KI-LPG/2021		Juni 2021	SPT	
36	40/KI-LPG/VI/2021	Kepala BPS Provinsi Lampung	Juni 2021	Penyampaian Data Informasi	<i>Berkas PSI Tahun 2020</i>
37	41/KI-LPG/VI/2021	Bapak Sekda Prov. Lampung	18 Juni 2021	Penyesuaian Besaran Honorarium & Tunjangan Kesejahteraan Komisioner KI Prov. Lampung	
38	800/42/V.14/KI-LPG/VI/2021	-	22 Juni 2021	SPT untuk mengikuti pelatihan pembuatan Putusan Ajudikasi Gelombang ke-2	<i>Tanggal : 28-30 Juni 2021 Tempat : Hotel Horison Ultima Bekasi</i>
39	43/KI-LPG/VI/2021	Kadis Kominfotik Prov. Lampung melalui Kabid Pengelolaan LIP	22 Juni 2021	Pengajuan Perjalanan Dinas Luar Daerah	

40	44/KI-LPG/VI/2021	Kadis Kominfotik Prov. Lampung	22 Juni 2021	Daftar Nama Peserta Tutorial Website	<i>Yuli, Fitri, Feby, Alva, Fahri</i>
41	700/45/V.14/KI-LPG/VI/2021	Kepala Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	30 Juni 2021	Penyampaian Keterangan Komisi Informasi Provinsi Lampung	<i>Basuki, Feby, Miftah</i>
42	800/46/V.14/KI-LPG/VI/2021	Kepala Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	30 Juni 2021	Menghadiri Surat Panggilan PTUN Bandar Lampung	<i>Basuki, Feby, Miftah</i>
43	800/47/V.14/KI-LPG/VI/2021	Kepala Kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	30 Juni 2021	Surat Kuasa Khusus	
44	48/KI-LPG/VII/2021	Kadis Kominfotik Provinsi Lampung	07 Juli 2021	Pemberitahuan Kantor KI Tutup	
45	49/KI-LPG/VIII/2021	Sdr. Sutoyo, MBA	02 Agustus 2021	Penyampaian Permintaan Informasi	
46	50/KI-LPG/VIII/2021	Gubernur Lampung	13 Agustus 2021	Penyampaian Laporan Komisi Informasi Semester Pertama Tahun 2021	
47	51/KI-LPG/VIII/2021	DPRD Provinsi Lampung	13 Agustus 2021	Penyampaian Laporan Komisi Informasi Semester Pertama Tahun 2021	

48	53/KI-LPG/VIII/2021	ITERA	31 Agustus 2021	MOU Antara KI Prov. Lampung dan ITERA	
49	54/KI-LPG/IX/2021	-Ketua DPRD Provinsi Lampung - Gubernur Lampung	29 Juni 2021	Penyampaian Laporan Tahunan 2020	<i>Tembusan : -Ketua Komisi I DPRD Prov. Lpg -Kadis Kominfotik Prov. Lpg</i>
50	800/55/V.14/KI-LPG/2021	ITERA	25 Agustus 2021	SPT Pak Tetua	<i>Narasumber Webinar ITERA</i>
51	800/56/V.14/KI-LPG/2021	Pemerintah Kab. Lampung Tengah	08 September 2021	SPT	<i>Narasumber FGD</i>
52	57/KI-LPG/IX/2021	Kadis Kominfotik Prov. Lampung	09 September 2021	Penerbitan SPT Dinas	
53	58/KI-LPG/IX/2021	-	09 September 2021	Surat Tugas Perbidang	<i>Tembusan : Komisioner KI Lampung</i>
54	800/59/KI-LPG/VIII/2021	Ditlantas Polda Lampung	23 Agustus 2021	Pembayaran Pajak Toyota Kijang BE 1066 BZ	<i>Pengantar Kadis</i>
55	800/60/KI-LPG/VIII//2021	Ditlantas Polda Lampung	23 Agustus 2021	Pembayaran Pajak Motor Honda BE 4047 BZ	<i>Pengantar Kadis</i>
56	61/KI-LPG/IX/2021	Dr. Dedy Hermawan, S.Sos., M.Si	23 September 2021	Permohonan untuk menjadi Narasumber FGD Tahun 2021	
57	62/KI-	Kadis Kominfotik	23	Permohonan	

	LPG/IX/2021	Provinsi Lampung	September 2021	memberikan sambutan Acara FGD	
58	63/KI-LPG/IX/2021	Krida Susanto, S.H., M.H	23 September 2021	Pembawa Acara FGD	
59	64/KI-LPG/IX/2021	Edi Maryanto	23 September 2021	Pembaca Doa Acara FGD	
60	65/KI-LPG/X/2021	Dr. Budiyo, S.H., M.H	01 Oktober 2021	Permohonan untuk menjadi Narasumber FGD Tahun 2021	
61	66/KI-LPG/X/2021	Ivin Aldyan Firnandez	05 Oktober 2021	-	
62	67/KI-LPG/X/2021	Kadis Kominfo Prov. Lampung	04 Oktober 2021	Permintaan Upgrade Website KI Prov. Lpg	<i>Hari : Kamis, Tanggal : 14 Oktober 2021 Pukul : 14.00 WIB</i>
63	68/KI-LPG/X/2021	Ketua Aksi Milenial	12 Oktober 2021	Pembahasan Rencana Kertja	<i>Hari : Kamis, Tanggal : 14 Oktober 2021 Pukul : 14.00 WIB</i>
64	69/KI-LPG/X/2021	Ketua Relawan TIK	12 Oktober 2021	Pembahasan Rencana Kertja	<i>Hari : Kamis, Tanggal : 14 Oktober 2021 Pukul : 14.00 WIB</i>
65	70/KI-LPG/X/2021	SMA N 2 Bandar Lampung	25 Oktober 2021	SPT Menjadi Narasumber An ; M.Fuad, S.Sos	<i>Hari : Jum'at, Tanggal : 29 Oktober 2021 Pukul : 09.05-10.05 WIB</i>
66	800/71/V.14/KI-	-	27	SPT Menjadi	<i>Tanggal : 31-</i>

	LPG/2021		Oktober 2021	Narasumber An : Erizal, S.Ag	<i>3 November 2021 Tempat : Yogyakarta</i>
67	72/KI-LPG/X/2021	Kadis Kominfotik Melalui Kabid PLIP	29 Oktober 2021	Pengajuan Perjalanan Dinas An; Erizal, S.Ag	
68	700/73/XI/KI- LPG/2021	Bupati Lampung Utara	01 November 2021	Pemberitahuan	
69	700/74/XI/KI- LPG/2021	PTUN Bandar Lampung	November 2021	Penyerahan Salinan Resmi Putusan beserta seluruh berkas perkaranya	<i>JNI terhadap Inspektorat</i>
70	75/KI- LPG/XI/2021	BPJS Kesehatan	09 November 2021	SPT Pak Ketua Menjadi Narasumber	<i>Hari : Rabu, Tanggal : 10 November 2021 Pukul : 17.00 WIB</i>
71	76/KI- LPG/XI/2021	Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung	12 November 2021	Usulan PPTK Program Kegiatan KI Lampung TA. 2022	
72	77/KI- LPG/XI/2021	Kepala Dinas Kominfotik Provinsi Lampung Cq : Sekretaris Daerah	15 November 2021	Permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas	
73	78/KI- LPG/XI/2021	Bawaslu Provinsi Lampung	18 November 2021	Undangan	
74	79/KI- LPG/XI/2021	Pemerintah Kab. Pesawaran	28 September 2021	Kunjungan Kerja Ke Kabupaten/ Kota	
75	80/KI-	Pemerintah Kab.	28	Kunjungan	

	LPG/XI/2021	Pringsewu	September 2021	Kerja Ke Kabupaten/ Kota	
76	81/KI-LPG/XI/2021	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	28 September 2021	Kunjungan Kerja Ke Kabupaten/ Kota	
77	82/KI-LPG/XI/2021	Pemerintah Kab. Lampung Barat	28 September 2021	Kunjungan Kerja Ke Kabupaten/ Kota	
78	83/KI-LPG/XI/2021	Pemerintah Kab. Lampung Selatan	28 September 2021	Kunjungan Kerja Ke Kabupaten/ Kota	
79	84/KI-LPG/XI/2021	Pemerintah Kab. Lampung Utara	28 September 2021	Kunjungan Kerja Ke Kabupaten/ Kota	
80	85/KI-LPG/XI/2021	Pemerintah Kab. Way Kanan	28 September 2021	Kunjungan Kerja Ke Kabupaten/ Kota	
81	86/KI-LPG/XI/2021	Kota Metro	28 September 2021	Kunjungan Kerja Ke Kabupaten/ Kota	
82	87/KI-LPG/XI/2021	Kota Bandar Lampung	28 September 2021	Kunjungan Kerja Ke Kabupaten/ Kota	
83	87.a/KI-LPG/XI/2021	Kadis Kominfotik Provinsi Lampung	13 Desember 2021	Surat Permohonan Penetapan Tim Evaluasi Asisten Ahli	
84	88/KI-	-	14	SPT	<i>Hari : Kamis</i>

	LPG/XII/2021		Desember 2021		<i>Tanggal : 16 Desemebr 2021 Pukul : 09.00 WIB Tempat : Aula Bhinneka Tunggal Ika</i>
85	88.a/KI- LPG/XII/2021	Kadis Kominfotik Provinsi Lampung	21 Desember 2021	Penyampaian Hasil Evaluasi	
86	89/KI- LPG/XII/2021	Kadis Kominfotik Provinsi Lampung	31 Desember 2021	Penyampaian Hasil Evaluasi Asisten Ahli	